



Liceria & co.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERIKANAN



**2
0
2
5**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

LAKIP Tahun 2025 merupakan LAKIP tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang mengamatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel.

LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 memiliki peran strategis dimana laporan ini tidak hanya dipergunakan untuk memperbaiki capaian kinerja tahun sebelumnya tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan Program Pembangunan Strategis Dinas Perikanan untuk periode lima tahun ke depan. LAKIP merupakan tahapan terakhir dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi pada tahun berikutnya.

Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, informasi yang diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta informasi keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visis dan misi yang ingin dicapai.

Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dan acuan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai bahan evaluasi agar kinerja untuk tahun berikutnya dapat lebih baik mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Lubuk Alung, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Padang Pariaman



KHAIRUL AIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN	2
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
1.1.2 Struktur Organisasi dan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	3
1.3 PERMASALAHAN UTAMA.....	9
1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
BAB IV PENUTUP.....	80
4.1. Kesimpulan.....	80
4.2 Langkah Kedepan	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Jumlah Pegawai masing-masing Bidang	4
Tabel 1 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselonering	5
Tabel 1 3 Susunan Pejabat Struktural Dinas Perikanan Per 31 Desember 2024	6
Tabel 1 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 2 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	17
Tabel 2 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
Tabel 2 3 Berdasarkan Renstra 2021-2026	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2 4 Berdasarkan Renstra 2025-2029	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3 1 Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	24
Tabel 3 3 Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 Sesuai Renstra 2021-2026	26
Tabel 3 4 Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 Sesuai Renstra 2025-2029	26
Tabel 3 5 Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 ..	27
Tabel 3 6 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026	29
Tabel 3 7 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2026	30
Tabel 3 8 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis-1	33
Tabel 3 9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	- 34 -
Tabel 3 10 Realisasi Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	41
Tabel 3 11 Nama Kelompok yang dapat bantuan benih ikan untuk lubuk larangan perairan umum	42
Tabel 3 12 Capaian Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026	44
Tabel 3 13 Capaian Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029	44
Tabel 3 14 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah	47
Tabel 3 15 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung	51
Tabel 3 16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
Tabel 3 17 Capaian Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3) Jumlah Produksi Ikan Olahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026	56
Tabel 3 18 Capaian Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3) Jumlah Produksi Ikan Olahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029	56
Tabel 3 19 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3 20 Perkembangan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025	64
Tabel 3 21 Capaian Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4) Jumlah Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2026	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 jumlah pegawai Dinas Perikanan menurut tingkat pendidikan Tahun 2024	7
Gambar 2 1 Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029	15
Gambar 2 2 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025	
Berdasarkan Renstra 2021-2026.....	21
Gambar 2 3 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	
berdasarkan Renstra 2025-2029	22
Gambar 3 1 TEMU TEKNIS PENINGKATAN	- 35 -
Gambar 3 2 DOKUMEN PENERIMA BANTUAN SOSIAL	- 38 -
Gambar 3 3 DOKUMEN KEGIATAN TPI.....	40
Gambar 3 4 DOKUMENTASI (RESTOCKING).....	43
Gambar 3 5 DOKUMENTASI BIMTEK BUDIDAYA.....	53
Gambar 3 6 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran air pasok dan/atau buang UPTD BBI Lubuk Alung	55
Gambar 3 7 KEGIATAN GEMARIKAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas merupakan aspek penting bagi setiap unit kerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi organisasi perangkat daerah. Oleh sebab itu, seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap perangkat daerah sebagai entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Secara lebih terperinci, penyusunan laporan kinerja telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP Penyelenggaraan SAKIP meliputi 6 (enam) aspek diantaranya adalah rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis yang disusun sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan SAKIP. Selanjutnya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjabarkan program dan kegiatan dalam satu tahun dijadikan dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja program dan kegiatan atau indikator kinerja utama perangkat daerah yang bersifat spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*). Dalam hal pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Sedangkan pelaporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan disampaikan setiap triwulan maupun tahunan. Tahapan SAKIP paling akhir adalah reviu laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.

Dokumen LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2025 yang disusun juga didukung dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masing-masing pejabat eselon II, III, dan IV yang disertai dengan Rencana Aksi Tahun 2025. Analisis capaian kinerja Tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025. merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya atau untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja (*performance gap*) yang dapat dijadikan masukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, secara terperinci telah diatur susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai dengan pasal 12 ayat (3) huruf a, urusan pemerintahan meliputi kegiatan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, pembentukan Dinas Perikanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keunggulan sektor kelautan dan perikanan Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat d nomor 16 bahwa Dinas Perikanan adalah Dinas Tipe B. Untuk itu, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan perlu di atur dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan, maka tugas dan fungsi Dinas

Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang perikanan. Sedangkan fungsi Dinas Perikanan adalah:

- a. Penyusunan perencanaan bidang perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perikanan;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- g. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perikanan;
- h. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perikanan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- j. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perikanan;
- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- m. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perikanan;
- n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2021 tersebut, secara terperinci telah diatur susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi melalui Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (SOTK). Susunan organisasi terdiri sekretariat, 3 (tiga) bidang meliputi Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan, Bidang Perikanan Budidaya, dan Unit

Pelaksana Teknis. Selengkapnya, susunan organisasi mulai dari level eselon II, eselon III dan eselon IV dijelaskan sebagai berikut:

- p. Kepala Dinas
- q. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- r. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- e. Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi dan Publikasi
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan.
- s. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan.

Berdasarkan data Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Tahun 2023 Per 31 Desember 2024, jumlah pegawai Dinas Perikanan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dengan rincian seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.1. Dinas Perikanan dipimpin oleh Pejabat Eselon II yaitu Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.2. **Tabel 1.1**

Tabel 1 1 Jumlah Pegawai masing-masing Bidang

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	Sekretariat	6 orang
2.	Bidang Perikanan Tangkap	3 orang
3.	Bidang Perikanan Budidaya	5 orang
4.	Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan	5 orang
5.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	4 orang
	Jumlah	23 orang

sumber: Daftar Urutan dan Kepangkatan (DUK) Tahun 2023 (Kondisi 31 Desember 2025)

Sementara itu, jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 (satu) orang
2. Eselon III : 4 (Empat) orang
3. Eselon IV : 3 (Tiga) orang
4. Fungsional : 11 (Sebelas) orang
5. Staf : 2 (Dua) orang

Pegawai Dinas Perikanan terdiri berdasarkan golongan terdiri atas Golongan IV/c, IV/a, III/d, III/c, III/b, III/a, II/d/ II/c, dan II/b. Jumlah pegawai sebanyak 21 orang didominasi diikuti oleh pegawai golongan IV/c sebanyak 1 orang, pegawai golongan IV/b sebanyak 1 orang, pegawai golongan IV/a sebanyak 3 orang, pegawai golongan III/d sebanyak 7 orang, pegawai golongan III/c sebanyak 2 orang, pegawai golongan III/b sebanyak 1 orang, pegawai golongan III/a sebanyak 5 orang pegawai golongan II/d sebanyak 1 orang,. Selengkapnya, jumlah pegawai berdasarkan golongan dan eselon dapat dilihat pada Tabel 1.2. Sedangkan susunan pejabat struktural Dinas Perikanan secara lengkap pe 31 Desember 2023 disajikan pada tabel 1.3

Tabel 1 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselonering

Gol/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Fung	Staf	
Golongan IV/E	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/D	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan IV/C	-	1	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/B	-	-	1	-	-	-	-	1
Golongan IV/A	-	-	3	-	-	-	-	4
Golongan III/D	-	-	-	1	-	6	-	7
Golongan III/C	-	-	-	1	-	1	-	2
Golongan III/B	-	-	-	1	-	-	-	1
Golongan III/A	-	-	-	-	-	5	-	6
Golongan II/D	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan II/C	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan II/B	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan II/A	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/D	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/C	-	-	-	-	-	-	-	0
Golongan I/B	-	-	-	-	-	-	-	0

Gol/Ruang	Eselon					Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	V	Fung	Staf	
Golongan I/A	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL	0	1	5	3	0	13	1	23

Sumber: Daftar Urutan dan Kepangkatan (DUK) Tahun 2023 (Kondisi 31 Desember 2023)

Tabel 1 3

Susunan Pejabat Struktural Dinas Perikanan Per 31 Desember 2024

No	Nama	NIP	Pangkat	Gol	Eselon	Jabatan
1	Khairul N izam, S.Pi. MM	19680909 199803 1 010	Pembina Utama Muda	IV.C	II.A	Kepala Dinas
3	Ir. Eva Fatimah, MM	19680124 199703 2 003	Pembina Tk I	IV.B	III.A	Sekretaris
4	Asril, SP, M.Si	19690412 199403 1 006	Pembina	IV.A	III.B	KabidPerikananTangkap
5	Arwita AZ, S.Pi	19760726 200312 2 003	Pembina	IV.A	III.B	Kabid Budidaya Perikanan
6	Dedi Tama Putra,S.Pi	19850211 200604 1 004	Penata Muda TK. I	III.B	IV.B	Plt. Kepala UPT TPI
7	Hasrizal,ST	1967027 199003 1 001	Penata Tk.I	III.D	IV.B	KTU UPT BBI Lubuk Alung
8	Mukhlis, SP	1969 0224 1994031 004	Penata Tk I	III.D	IV.A	Kepala UPT BBI Lubuk Alung
9	Mukhlis,SE	19740813 200604 1 004	Penata Muda Tk. I	III.B	IV.B	Kasubag Umum dan Kepegawaian
No	Nama	NIP	Pangkat	Gol	Eselon	Jabatan
10	Ir. Mimi Elfinda	19680322 199308 2 001	Penata Tk. I	III.D	-	JF Pembina Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda
11	Ergis, SE	19791127 200212 2 003	PenataTk I	III.D	-	JF Pembina Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda
12	Yudasman, S.Pi	19760715 200604 1 008	PenataTk I	III.D	-	JF Analis Akuakultur Ahli Muda
13	Rosneli, S.Pi	19760429 200604 1 007	PenataTk I	III.D	-	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
14	Handry Yasril,SE	19731108 200303 2 004	Penata	III.C	-	JF Analis Kebijakan Ahli Muda
15	Riswandi, S.Pi	19760822 201101 1 005	Penata Tk I	III.D	-	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
16	Selviana Niki Fitria,S.Pi	19960227 201903 2 005	Penata Muda	III.A	-	JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama
17	Elvi Andi,S.Pi	19770817 201001 1 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Budidaya Perikanan
18	Wahyu Riwanda,S.Pi	19950228 202203 1 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Budidaya Perikanan

19	Wifil Idli,S.Pi	19880124 202203 2 005	Penata Muda	III.A	-	Analisis Benih
20	Firdaus	19740617 200701 1 007	Penata Muda	III.A	-	Staf Dinas Perikanan
21	Sutarya	19791015 200801 1 027	Pengatur Tk I	II.D	-	Staf Dinas Perikanan

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Per 31 Desember 2024

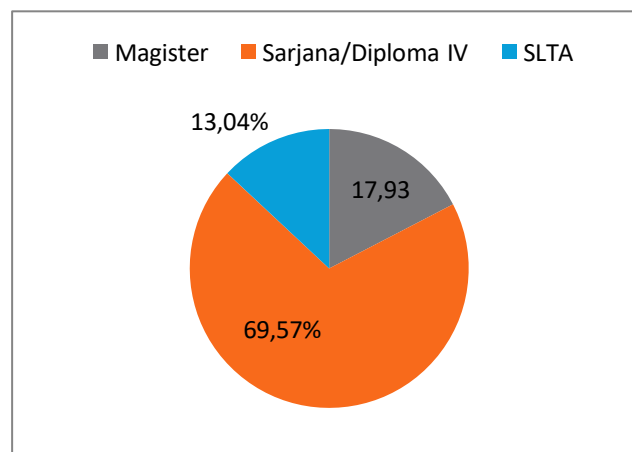
Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perikanan terdiri atas magister, sarjana/ diploma IV dan SLTA. Tingkat pendidikan yang paling dominan adalah setingkat sarjana/ (Strata-1) dan diploma (Diploma-IV) yaitu dengan jumlah 16 orang atau sebesar 69,57 %. Selengkapnya, jumlah pegawai Dinas Perikanan menurut tingkat pendidikan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Gambar 1.1.

Tabel 1 4

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Magister	4	17,93
2.	Sarjana/Diploma IV	15	69,57
3.	SLTA	2	13,04
	Jumlah	21	100

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Per 31 Desember 2023



Gambar 1 1

jumlah pegawai Dinas Perikanan menurut tingkat pendidikan Tahun 2024

KEPALA DINAS
KHAIRUL NIZAM,S.Pi,MM
NIP. 19680909199803 1 010

SEKRETARIS
Ir.Eva Fatimah,MM
NIP.19680124 1997032 003

Bidang Perikanan Tangkap
Asril,SP.M,Si
NIP. 19690412 199403 1 006

Analisis Kebijakan Muda
Handry Yarsil,SE
NIP. 19730126 200604 1 003

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Riswandi,S.Pi

Bidang Perikanan Budidaya
Arwita,AZ, S.Pi
NIP.19760726 200312 2 003

Analisis Akuakultur
Yudasman,S.Pi
NIP. 19760715 200604 1 008

Pengawas Perikanan Ahli Muda
Selvianan Niki Fitria, S.Pi
NIP. 19960227 201903 2 005

Analisis Budidaya Perikanan
Elvi Andi, S.Pi
NIP. 19770817 201001 1 006

Analisis Benih
Wifil Idli, S.Pi
NIP. 19880124 202203 2 005

**Bidang Perikanan Bina Usaha
Pemberdayaan dan Kelembagaan**
Hanafi, S.ST.Pi
NIP.19700410 199403 1 006

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Ergis,SE
NIP.19791127 200212 2 003

Analisis Kebijakan Muda
Rosneli,S.Pi
NIP.19760429 200604 2 007

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mukhlis,SE
NIP. 19740813 200604 1 004

Plt.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan
Wahyu Riwanda, S.Pi
NIP. 19950228 202203 1 005

UPT BBI PADANG PARIAMAN
Mukhlis,SP
NIP.19690224 199403 1 004

Plt. UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN
Dedi Tama Putra,S.Pi
NIP.19850211 200604 1 004 **UPT**

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama sektor perikanan di Kabupaten Padang Pariaman adalah belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap maupun budidaya sehingga menyebabkan rendahnya produksi perikanan. Pelaku usaha dan pelaku utama dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi pengolahan ikan masih mengalami berbagai hambatan dan kendala baik aspek sarana prasarana maupun dari aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Lebih jelasnya permasalahan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana nelayan masih semi tradisional

Keterbatasan kondisi peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan menyebabkan hasil tangkapan tidak optimal atau mengalami penurunan. Jenis alat tangkap yang digunakan nelayan yang masih sederhana hanya mampu melakukan penangkapan ikan pada zona 4 mil, sementara jumlah populasi ikan pada area tersebut sudah berkurang. Oleh sebab itu, sangat diperlukan perhatian pemerintah daerah supaya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan oleh nelayan, yaitu dengan cara modernisasi sarana prasarana penangkapan ikan.

2. Penangkapan ilegal (*illegal fishing/ destructive fishing*)

Jumlah hasil tangkapan oleh nelayan mengalami penurunan juga disebabkan karena terjadinya penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan tetangga atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal fishing/ destructive fishing*. Tindakan tersebut berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut seperti kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan peledak yang berbahaya bagi ekosistem dan lingkungan.

3. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah

Kondisi yang ada saat ini, belum adanya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang memiliki Surat Keterangan Asal Induk Ikan (SKAI). Kualitas benih ikan yang dihasilkan yang semakin menurun disebabkan karena induk-induk ikan yang dikawinkan/ dipijahkan sudah afkir (ketentuan pemijahan) yaitu lebih dari 6 kali pemijahan. Di samping itu, terjadinya serangan penyakit pada saat cuaca ekstrim

menjadi penyebab rendahnya kualitas benih. Solusi permasalahan ini adalah melakukan peremajaan induk yang dihasilkan oleh Balai Pengembangan Budidaya Harga pakan tidak seimbang dengan harga jual Tingginya harga pakan menyebabkan pembudidaya ikan mengalami kesulitan dalam perolehan pakan ikan, sementara harga ikan di pasaran tetap sama atau dengan kata lain tidak mengalami kenaikan. Hal ini dapat diatasi dengan pengembangan pakan alternatif yang berasal dari bahan baku lokal. Namun, pada aplikasinya di lapangan, pembuatan pakan alternatif tersebut membutuhkan sarana dan prasarana teknologi mekanik yang memerlukan biaya investasi dan operasional yang cukup besar. Sehingga, bantuan serta peran serta pemerintah daerah sangat diharapkan dalam hal pengadaan sarana dan prasarana tersebut.

4. Masih rendahnya mutu olahan hasil perikanan

Mutu olahan hasil perikanan masih rendah disebabkan karena kualitas SDM yang masih rendah serta sarana prasarana pengolahan belum memadai. Dalam proses pengolahan ikan, kecendrungan penyalahgunaan formalin pada produk perikanan khususnya ikan segar dan ikan kering masih ditemukan di lapangan. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan pengawasan yang sangat ketat sehingga dapat mendorong terciptanya produk olahan yang bermutu sesuai standar sanitasi dan higienis (sesuai Permen KP nomor 57 tahun 2015) tentang Sistem Jaminan Mutu.

5. Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk mengurus legalitas usaha

Salah satu faktor penting keberhasilan dalam pencapaian jumlah produksi ikan olahan adalah karena adanya keterlibatan serta peran aktif Perangkat Daerah terkait. Namun, tidak disertai dengan adanya kesadaran masyarakat pelaku usaha perikanan untuk mengurus perizinannya sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Selain Dinas Perikanan sebagai instansi teknis terkait sebagai pembina kepada kelompok Unit Pengolahan Ikan (UPI). Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha dapat dilakukan melalui sosialisasi mengenai proses perizinan. Dengan adanya legalitas usaha diharapkan dapat meningkatkan daya saing produksi olahan ikan.

6. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang masih rendah

Kualitas SDM para pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya maupun produk olahan hasil perikanan masih rendah, sehingga sangat diperlukan program kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat tersebut. Nelayan yang dalam kesehariannya masih menggunakan peralatan yang sederhana diharapkan dapat menggunakan mesin yang lebih modern, agar hasil tangkapan yang diperoleh juga optimal. Demikian juga halnya dengan pembudidaya ikan, sebaiknya dapat menerapkan teknik serta Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) melalui kegiatan sosialisai, pelatihan ataupun studi tiru ke daerah lain yang sektor perikanannya lebih maju. Di samping itu, dalam mencapai standar mutu produk hasil olahan perikanan sangat diperlukan sosialisasi serta pelatihan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) hasil perikanan.

7. Kemandirian Pelaku Usaha Perikanan masih rendah

Masyarakat pelaku usaha perikanan masih belum bisa mandiri walaupun telah diberikan bantuan berupa sarana, prasarana maupun bibit ikan. Kondisi ideal yang diharapkan setelah pemberian bantuan, terjadi peningkatan kemampuan kelas kelompok perikanan pemula menjadi madya dan kelompok kelas madya menjadi utama. Kemandirian usaha kelautan dan perikanan membangun kemandirian serta meningkatkan manajemen dan daya saing kelompok masyarakat pelaku utama atau usaha kelautan dan perikanan. kemandirian kelompok dapat terwujud melalui pendampingan dan penyuluhan oleh penyuluh perikanan.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2025 menjabarkan laporan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025. Penilaian dan pengukuran capaian berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika Penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan informasi umum mengenai dasar hukum serta latar belakang perlunya penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025. Bab ini juga menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Perikanan, permasalahan utama serta isu strategis (*strategic issues*) lingkup urusan perikanan, dan sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan capaian kinerja Dinas Perikanan dan realisasi anggaran tahun 2025.

1.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Menyajikan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariamansesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman. Analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

1.2 Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta strategi peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman yang akan dilakukan untuk masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029

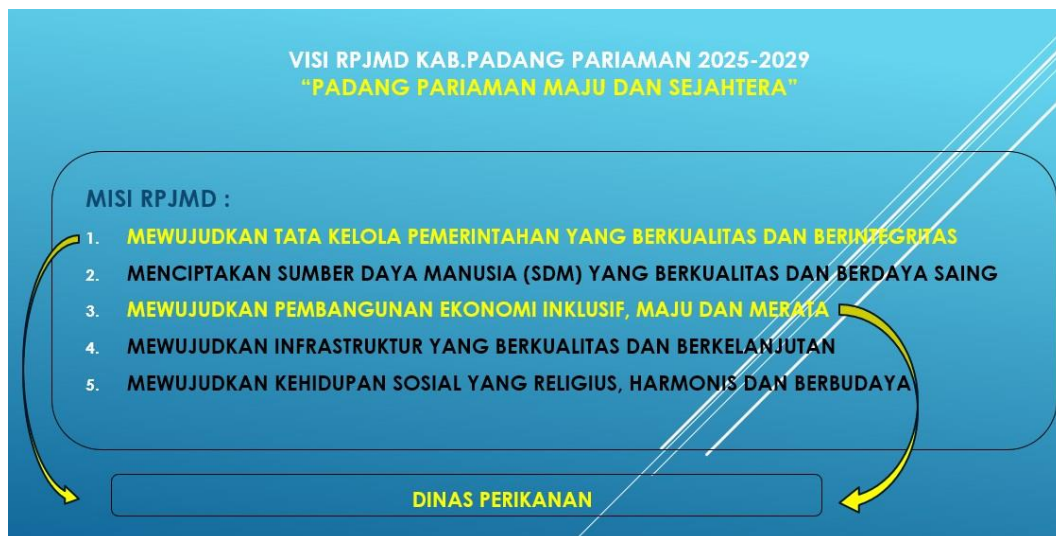
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan suatu organisasi yang dijadikan landasan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis menjabarkan tentang pernyataan visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi. Visi dan misi organisasi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Perangkat Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, visi Dinas Perikanan mendukung terwujudnya visi daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yaitu “Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”. Maksud dari pernyataan visi tersebut adalah merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, diperlukan misi yang jelas sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, Dinas Perikanan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Misi III yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat”. Selengkapnya, visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2 1



Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

A. Misi

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas. Misi ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil (result-based governance), sebagaimana tertuang dalam visi-misi kepala daerah saat pendaftaran ke KPU. Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, misi ini diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Misi ini juga sejalan dengan prinsip good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, keadilan, dan inklusivitas. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks melalui sistem pengelolaan yang adaptif, profesional, dan berbasis teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya, Misi 1 akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN), percepatan transformasi digital dalam sistem birokrasi, peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan peran pengawasan internal dan partisipasi masyarakat, membangun harmonisasi dan budaya kerja yang sehat, transparan, akuntabel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), membangun sinergitas arah pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi serta mendorong konsep smart city di setiap nagari secara bertahap dalam mewujudkan pelayanan prima. Selain itu, misi ini juga berupaya memperkuat fungsi dukungan kepada DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memastikan keterbukaan informasi.

publik sebagai wujud dari pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata. Pembangunan ekonomi inklusif merupakan strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi ini diarahkan pada penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta penciptaan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari visi kepala daerah, misi ini mendorong peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi. Pemerintah daerah juga akan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, memperluas akses permodalan dan pasar, serta melakukan inovasi dalam promosi dan branding produk unggulan daerah. Misi ini akan difokuskan kepada:

1. Mendorong setiap pemerintahan nagari menciptakan wisata dan produk unggulan yang berdaya saing.
2. membangun sinergiitas arah pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi.
3. mengoptimalkan sektor pariwisata, pertanian dan perikanan sebagai kekuatan utama dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu dekat. Misi lebih terkonsentrasi pada kondisi saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi. Misi Dinas Perikanan adalah *“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan”*

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi serta permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi dalam rangka mewujudkan tercapainya visi serta pelaksanaan misi Dinas Perikanan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Perikanan yang telah ditetapkan. Berpedoman kepada dokumen perencanaan jangka menengah daerah tersebut, telah disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029. Tujuan Dinas Perikanan adalah *“Terwujudnya Peningkatan Perekonomian melalui Sektor Perikanan”* yang dicapai melalui Misi yaitu *“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perikanan”*. Sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut, tujuan Dinas Perikanan akan diuraikan ke

dalam sasaran strategis yang dirumuskan secara spesifik dan terukur agar dapat dicapai dalam waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu pencapaian tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian tujuan.

Sasaran Dinas Perikanan merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan dengan maksud agar dapat menjamin terlaksananya perencanaan jangka menengah. Di samping itu, penetapan sasaran juga dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian serta pemantauan kinerja Dinas Perikanan. Tujuan serta sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.1

dijabarkan dengan 2 (dua) sasaran yaitu: 1) Meningkatnya Produksi Perikanan dan 2) Meningkatnya Produksi Olahan Ikan yang Berdaya Saing Tinggi. Oleh sebab itu, telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur untuk mencapai tujuan agar terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat perikanan.

Tabel 2 1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Misi	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan	
Tujuan	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan	
	Sasaran 1	Meningkatnya Produksi Perikanan
	Sasaran 2	Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan
	Sasaran 3	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan
	Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Sumber: Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis suatu perangkat daerah. Dinas Perikanan telah merumuskan IKU sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, telah ditetapkan 4 (empat) IKU Dinas Perikanan seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Renstra 2021-2026

Misi 3	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan			Rumus
Tujuan	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Perikanan			
	Sasaran 1	Meningkatkannya Produksi Perikanan		
		IKU 1	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	(Produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi produksi perikanan budidaya tahun n-1) dibagi produksi perikanan budidaya tahun n-1 kali 100%
		IKU 2	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	(Produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi produksi perikanan tangkap tahun n-1) dibagi produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100%
	Sasaran 2	Meningkatkannya Pengolahan Hasil Perikanan		
		IKU 3	Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatan Produksi olahan Hasil Perikanan (produksi olahan hasil perikanan tahun n dikurangi produksi olahan hasil perikanan tahun n-1) dibagi produksi olahan perikanan tahun n-1 dikali 100%
	Sasaran 3	Meningkatkannya Pemasaran hasil Perikanan		
		IKU 4	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/ tahun)	
Misi 5	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan			
Tujuan	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel			
	Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		
		IKU 5	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Renstra 2025-2029

Misi 3	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi inklusif, maju, dan Merata			Rumus
Tujuan	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif			
	Sasaran 1	Meningkatkannya Produksi Perikanan		
		IKU 1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	(Produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi produksi perikanan budidaya tahun n-1) dibagi produksi perikanan budidaya tahun n-1 kali 100%
		IKU 2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	(Produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi produksi perikanan tangkap tahun n-1) dibagi produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100%
	Sasaran 2	Meningkatkannya Pengolahan Hasil Perikanan		
		IKU 3	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi olahan Hasil Perikanan (produksi olahan hasil perikanan tahun n dikurangi produksi olahan hasil perikanan tahun n-1) dibagi produksi olahan perikanan tahun n-1 dikali 100%
Misi 1	Tujuan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah		
Misi 1	Tujuan	IKU 4	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/ tahun)	
		IKU 5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2025 menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus penguatan arah kebijakan organisasi sebagaimana tertuang dalam peralihan Renstra 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029. Pada kedua periode Renstra tersebut, Dinsa Perikanan tetap menempatkan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagai tujuan utama, dengan indikator kinerja berupa nilai SAKIP/AKIP perangkat daerah yang ditargetkan mencapai kategori A. Hal ini mencerminkan komitmen Dinas Perikanan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional dan daerah.

Di Renstra 2021–2026 Dinas Perikanan menitik beratkan pada penguatan Persentase pada bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, produksi ikan olahan dan tingkat konsumsi ikan

Selanjutnya, dalam Renstra 2025–2029, terjadi penurunan pada persentase perikanan tangkap, perikanan budidaya, produksi ikan olahan dikarenakan cuaca yang ekstrem serta bencana alam yang terdapat di berbagai wilayah kabupaten padang pariaman. Namun Pada renstra 2025-2029 Dinas Perikanan Terus mendorong kenaikan angka tingkat konsumsi ikan melalui beberapa program atau sosialisasi yang dilakukan dinas perikanan kepada sekolah-sekolah maupun kelompok dasawisma / PKK di kabupaten padang pariaman.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Perikanan dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dan penetapan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan 2025 telah mempedomani hasil evaluasi capaian realisasi kinerja Dinas Perikanan 2024. PK Tahun 2025 sudah berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai Hasil (*outcome*) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja

Gambar 2 2

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Tingkat Produksi perikanan budidaya	2,12 %
		Persentase Tingkat Produksi perikanan tangkap	1,64 %
II	Meningkatnya Pengolahan hasil Perikanan	Persentase Tingkat Produksi ikan olahan	2,04 %
III	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan	45,95 kg/ kapita/ tahun
IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	A (81,00)

Gambar 2 3

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,08 %
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,59 %
II	Meningkatnya Pengolahan hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	1,90 %
III	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	45,95 kg/ kapita/ tahun
IV	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan misi instansi tersebut dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan. Akuntabilitas menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Perikanan yang tertuang dalam dokumen rencana jangka menengah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja selama tahun 2025 disajikan dalam bentuk data-data serta analisis yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja berdasarkan kriteria, “jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik”, sehingga persentase (%) capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi dengan skala pengukuran berdasarkan Keputusan Kepala LAN 293 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 dengan pengukuran skala ordinal seperti yang dijelaskan pada tabel 3.1

Tabel 3 1

Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Skala Ordinal (%)	Prediket/Kategori
1.	>100	Sangat Berhasil
2.	$90 < s.d \leq 100$	Berhasil
3.	$70 < s.d \leq 89$	Cukup Berhasil
4.	≤ 70	Kurang Berhasil

Sumber :Permendagri 54 tahun 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 tahun 2003

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 dianalisa dan dievaluasi berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan atau keberhasilan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan kinerja tahun ini, tahun sebelumnya serta dengan target jangka menengah.

Di samping itu, juga dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tingkat provinsi/ nasional terhadap indikator yang sama, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2025 yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dengan 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3 2

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatkanya Produksi Perikanan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan budidaya	Persen (%)	2,12%	1,81%	85,37 %	Cukup Berhasil
		Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Persen (%)	1,64 %	1,33 %	81,09 %	Cukup Berhasil
2.	Meningkatkanya Pengolahan hasil perikanan	Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan	Persen (%)	2,04 %	1,60%	78,43 %	Cukup Berhasil
3.	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/ kapita/ tahun	45,95	44,05	95,86 %	Berhasil
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat	Huruf	A (81,00)	A (80,15)	98,95 %	Berhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 berdasarkan renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatkannya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen (%)	2,08 %	1,81%	87,02 %	Cukup Berhasil
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen (%)	1,59 %	1,33 %	83,65 %	Cukup Berhasil
2.	Meningkatkannya Pengolahan hasil perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen (%)	1,90 %	1,60%	84,21 %	Cukup Berhasil
3.	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	45,95	44,05	95,86 %	Berhasil
4.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Huruf	A (81)	A (80,15)	98,95 %	Berhasil

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2025 di atas, capaian semua indikator sasaran yaitu “**Cukup Berhasil**” dan “**Berhasil**”

SASARAN STRATEGIS (SS-1) **“Meningkatnya Produksi Perikanan”**

Sasaran Strategis-1 “Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap”, memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, yang merupakan jumlah total produksi perikanan laut dan perairan umum yang diproduksi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

IKU-1

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” adalah 19.943,23 ton/tahun dan “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” pada Tahun 2024 adalah 19.681,1 ton/tahun dengan realisasi kinerja IKU-1 Persentase Tingkat Produksi Perikanan dengan menggunakan formulasi (*Produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi*

produksi perikanan tangkap tahun n-1) dibagi produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100% maka didapatkan hasilnya Kenaikan sebesar 1,33 % menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan interpretasi “Cukup Berhasil”. Selengkapnya, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-1) dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3 3
Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1)
Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 Sesuai Renstra 2021-2026

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2024			Interpretasi
			Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	2,12 %	1,33%	81,09 %	Cukup berhasil

Tabel 3 4
Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1)
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 Sesuai Renstra 2025-2029

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TAHUN 2024			Interpretasi
			Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,59 %	1,33%	83,65 %	Cukup Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU-1) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 1,33%. Apabila diukur menggunakan target Renstra 2021–2026 sebesar 2,12%, capaian kinerja mencapai 81,09% dengan kategori berhasil. Sementara itu, berdasarkan target Renstra 2025–2029 sebesar 1,59%, capaian kinerja meningkat menjadi 83,65% dan tetap berada pada kategori cukup berhasil. Perbedaan tingkat capaian tersebut disebabkan oleh penyesuaian target pada dokumen Renstra yang baru, sehingga target menjadi lebih sesuai dengan kondisi dan potensi riil subsektor perikanan tangkap. Meskipun target belum tercapai sepenuhnya, realisasi yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi dasar untuk optimalisasi program peningkatan produksi pada tahun berikutnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kinerja capaian sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan dengan indikator kinerja persentase tingkat produksi perikanan tangkap dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 3 5
Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1)
Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaika)	Realisasi (%)	% Capaian	
1	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Persen (%)	1,62 %	1,34%	82,71 %	1,64 %	1,33 %	81,09 %	Cukup Berhasil

Tabel 3 6
Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1)
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaika)	Realisasi (%)	% Capaian	
1	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen (%)	1,62 %	1,34%	82,71 %	1,59 %	1,33 %	83,65 %	Cukup Berhasil

indikator Kinerja Utama (IKU-1) yaitu **Persentase Tingkat/Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap** pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada pada kategori **Cukup Berhasil**.

Berdasarkan **Renstra 2021–2026**, target peningkatan produksi perikanan tangkap Tahun 2025 ditetapkan sebesar **1,64%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **1,33%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **81,09%** dari target.

Sementara itu, berdasarkan **Renstra 2025–2029**, target Tahun 2025 mengalami penyesuaian menjadi **1,59%**, dengan realisasi yang sama yaitu **1,33%**. Penyesuaian target tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **83,65%**, yang juga termasuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi peningkatan produksi mengalami sedikit penurunan, dari **1,34%** menjadi **1,33%** atau turun sebesar **0,01 poin persentase**. Penurunan tersebut menyebabkan capaian terhadap target Tahun 2025 belum optimal.

Perbedaan persentase capaian antara kedua Renstra disebabkan oleh adanya perubahan target kinerja. Meskipun nilai realisasi tetap sama, target yang lebih rendah pada Renstra 2025–2029 (1,59%) menghasilkan persentase capaian yang lebih tinggi (**83,65%**) dibandingkan dengan Renstra 2021–2026 (**81,09%**).

Secara keseluruhan, capaian IKU-1 Tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi perikanan tangkap telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya ikan, peningkatan kapasitas dan teknologi penangkapan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan agar target kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator persentase tingkat produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari sebelumnya Rendahnya kualitas SDM Nelayan dalam hal teknologi penangkapan ikan, dibuktikan dengan masih rendahnya pemilikan dan pemanfaatan sarana penangkapan yang berteknologi tinggi.

C. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026, realisasi capaian produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan yaitu 262,13 ton atau naik sebesar 1,33 %. kenaikan terjadi pada 1 (satu) tahun terakhir 19.943,23 ton (2025). Hal tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan jumlah produksi perikanan tangkap dari sektor perikanan laut dari 18.954,10 ton/tahun (2024) naik menjadi 19.152,23 ton/tahun (2025). Dan diikuti kenaikan produksi Perikanan Umum Daerah (PUD) mengalami kenaikan dari 727,00 ton pada tahun 2024 turun menjadi 791,00 ton pada tahun 2025. Selengkapnya, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5 dan Gambar 3.1

Tabel 3 6
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS-1						MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN						Capaian				
IKU-2						PRESENTASE TINGKAT PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (%)						Target Realisasi				
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
2,01 %	2,03 %	1,60 %	1,62%	1,64%	1,66%	2 %	5,6%	1,5%	1,34%	1,34 %		99,16%	101,7%	93,75%	82,71%	81,09%

Tabel 3 7
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2029

SASARAN STRATEGIS-1						MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN						Capaian				
IKU-2						PRESENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (%)						Target Realisasi				
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
2,01 %	2,03 %	1,60 %	1,62%	1,59%	1,61%	2 %	5,6%	1,5%	1,34%	1,34 %		99,16%	101,7%	93,75%	82,71%	83,65%

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase Tingkat/Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap** menunjukkan bahwa capaian kinerja selama periode perencanaan mengalami fluktuasi. Pada awal periode Renstra, capaian indikator masih mampu memenuhi bahkan melampaui target, namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

Berdasarkan **Renstra 2021–2026**, target peningkatan produksi perikanan tangkap meningkat secara bertahap dari **2,01% pada tahun 2021** menjadi **1,66% pada tahun 2026**. Realisasi tahun 2021 mencapai **2,00%** atau **99,16%** dari target. Pada tahun 2022, realisasi meningkat signifikan menjadi **5,60%** dengan capaian **101,70%**, sehingga melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2023 realisasi menurun menjadi **1,50%** dengan capaian **93,75%**, kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi **1,34%** dengan capaian **82,71%**. Pada tahun 2025, realisasi tetap sebesar **1,33%**, sedangkan target meningkat menjadi **1,64%**, sehingga tingkat capaian menjadi **81,09%**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada dua tahun terakhir belum mampu mengikuti target peningkatan produksi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021–2026.

Sementara itu, berdasarkan **Renstra 2025–2029**, target tahun 2025 disesuaikan menjadi **1,59%** dan target tahun 2026 menjadi **1,61%**. Dengan realisasi tahun 2025 sebesar **1,33%**, tingkat capaian meningkat menjadi **83,65%**. Meskipun capaian persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan Renstra 2021–2026, hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian target yang lebih rendah, bukan karena adanya peningkatan realisasi produksi.

Secara keseluruhan, tren capaian menunjukkan bahwa setelah mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2022, peningkatan produksi perikanan tangkap mengalami perlambatan pada periode 2023–2025. Penurunan capaian tersebut mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan

dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap, seperti kondisi cuaca yang kurang mendukung, fluktuasi potensi sumber daya ikan, keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan, serta faktor operasional nelayan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program peningkatan produktivitas perikanan tangkap melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan, peningkatan teknologi penangkapan, penyediaan sarana pendukung, serta pembinaan kepada pelaku usaha perikanan agar target jangka menengah hingga akhir periode Renstra dapat tercapai secara optimal.

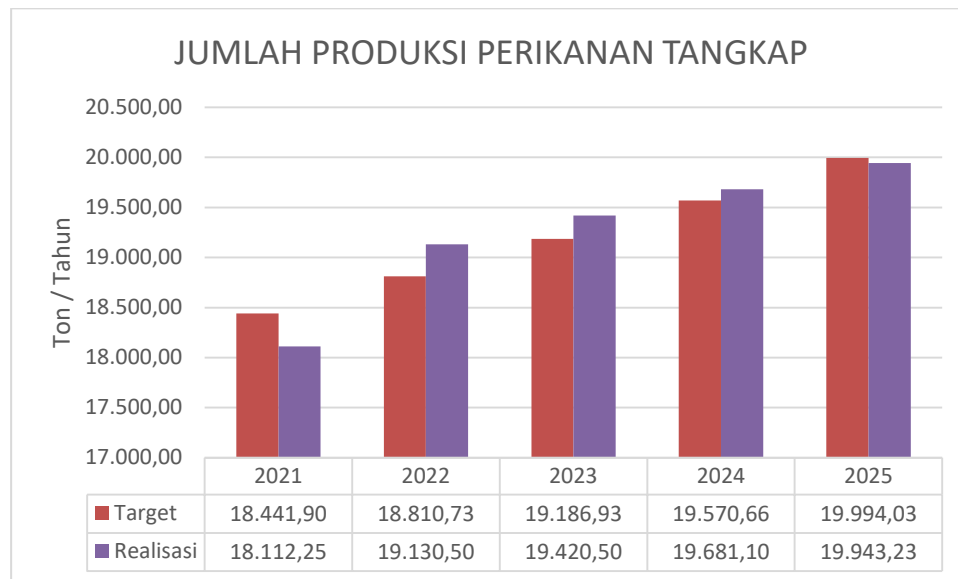
Sumber: Buku Informasi Statistik Dinas Perikanan, 2024 dan 2025 dan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Tabel 3 8
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2026

KOMODITAS	TAHUN						PERTUMBUHAN
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024-2025 (%)
Perikanan Tangkap							
Perikanan Laut	17870,00	18768,70	18.656,60	18.954,10	19.152,23	-	1,05%
Perairan Umum Daerah (PUD)	242,50	361,80	763,90	727,00	791,00	-	8,80%
Jumlah	18.112,25	19.130,5	19.420,5	19.681,10	19.943,23	-	9,85%

Sumber: Buku Informasi Statistik Dinas Perikanan, 2024 dan 2025





Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021 – 2025

Produksi perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan Perairan Umum Daerah (PUD). Hasil komoditas perairan laut terdiri atas berbagai jenis ikan di antaranya adalah Ikan Kembung, Tongkol, Cakalang, Udang, kerapu, Kuwe, Bawal, Cumi cumi, Hiu, Layaran, Pari dll. Sedangkan jenis ikan di perairan darat pada umumnya didominasi oleh Ikan Nila, Mas, Garing, Gabus, Baung, sidat, betok dll yang tersebar di lokasi perairan umum seperti sungai di 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Produksi perikanan laut tersebut dihasilkan oleh nelayan yang berada di 6 (enam) kecamatan pesisir Padang Pariaman yaitu Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau dan Batang Gasan. Nelayan tersebut menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana seperti pukat tepi/ pantai, payang, jaring insang tetap, jaring insang hanyut, pancing ulur rawai dan bubu. Walaupun banyaknya bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2024 namun produksi perikanan tangkap tidak mencapai target 1,59 % di karenakan :

D. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Upaya Peningkatan

1. Faktor Penghambat

- a. Rendahnya kualitas SDM Nelayan dalam hal teknologi penangkapan ikan, dibuktikan dengan masih rendahnya pemilikan dan pemanfaatan sarana penangkapan yang berteknologi tinggi.
- b. Disamping itu penentuan Lokasi tangkapan (Fishing Ground) masih mengikuti tanda tanda Alam dan belum banyak menggunakan teknologi (Fish Finder) sifatnya masih ikut ikutan
- c. Kurang maksimalnya jam kerja yang digunakan oleh nelayan dalam

penangkapan ikan (berangkat Pagi pulang Sore)

- d. Fasilitas pendaratan ikan tidak memadai bagi perahu yang kapasitas besar
- e. Belum adanya kelembagaan koperasi nelayan yang akan memfasilitasi permodalan, sarana prasarana dan pemasaran hasil perikanan
- f. Kondisi Iklim cuaca Extrem

2. Faktor Pendukung

- a. Jumlah Penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan cukup banyak sekitar 1.739 orang
- b. Potensi Sumber Daya Ikan masih memadai
- c. Adanya Peningkatan Mekanisasi armada dan alat tangkap
- d. Keragaman alat tangkap yang dimiliki nelayan cukup bervariasi

E. Langkah Tindak Lanjut

1. Diperlukan pembinaan untuk nelayan dengan kolaborasi antara petugas teknis dinas dan penyuluh perikanan dalam hal peningkatan kapasitas nelayan tentang teknis penangkapan ikan, perbaikan dan perawatan mesin alat tangkap, serta penguatan kelembagaan nelayan
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi nelayan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Stake holder terkait
3. Peningkatan Kolaborasi dengan StakeHolder terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan nilai tukar nelayan
4. Memperkuat kapasitas wanita nelayan melalui pelatihan yang mengarah kepada diversifikasi produk olahan perikanan sehingga akan meningkatkan produksi olahan perikanan yang akan berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga nelayan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi suatu organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang dimiliki dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mencapai keberhasilan sasaran strategis-1, telah dilaksanakan 2 (dua) program, yaitu program pengelolaan perikanan tangkap yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu pengembangan kapasitas nelayan kecil dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dengan sub kegiatan

Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Anggaran yang dialokasikan dari APBD Tahun 2025 untuk kedua program di atas yang mendukung pencapaian sasaran strategis-1 yaitu meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah sebesar Rp 1.121.456.650 dan hanya terealisasi sebesar Rp 1.095.092.165. Alokasi anggaran dan realisasi seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.7 sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3 9
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis-1

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.115.769.150,00	1.089.422.165,00	26.346.985,00	97,64 %
1.	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.110.081.650,00	1.083.752.165,00	26.329.485,00	97.63%
a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	810.081.650,00	793.075.165,00	17.006.485,00	97,90%
b.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	300.000.000,00	290.677.000,00	9.323.000,00	96,89%
2.	<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	5.687.500,00	5.670.000,00	17.500,00	99,69%
a.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5.687.500,00	5.670.000,00	17.500,00	99,69%

Tabel 3 10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Persentase Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/ tahun)	83,65	98,67%	-15,02

Efisiensi Capaian Kinerja = $83,65 - 100 = -16,35$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100 - 98,67 = 1,33$

Total Efisiensi = $-16,35\% + 1,33\% = -15,02$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, **Indikator Kinerja Utama (IKU-1) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap** memperoleh capaian kinerja sebesar **83,65%**, dengan tingkat **penyerapan anggaran sebesar 98,67%**. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar -15,02%**.

Nilai efisiensi yang negatif menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Dengan kata lain, hampir seluruh anggaran yang dialokasikan telah direalisasikan, namun hasil yang dicapai belum sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap.

G. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja IKU-1

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan diantaranya adalah

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan ini, indikator kinerja pada sub kegiatan jumlah pelatihan kepada kelompok nelayan,

Daftar Nama Peserta Pelatihan:

No	Nama Kelompok Nelayan	Nama Peserta Pelatihan	Alamat	Ket
1	2	3	4	6
1	Koperasi Kamp. Nelayan	Tuli wardi	Ketapiang	
2		Irfianto	Ketapiang	
3	Penyuluh	Ari Putra Guci, S.Pi	Batang Anai	
4		Efrizal	Ulakan	
5		Syafruddin	Batang Gasan	
6	Maju Bersama	Andriz	Ulakan	
7		Nofrizal	Ulakan	
8		M.Rafi	Ulakan	
9		Ahmad Nur	Ulakan	
10	Mutiara Laut	Sukirman M.Nur	Ketapiang	
11	Ketaping Jaya	Suardi	Ketapiang	
12		Driyanto	Ketapiang	
13		Rio	Ketapiang	
14		Amir	Ketapiang	
15		Afrikonalis	Ketapiang	
16		Refin	Ketapiang	
17		Syahrul	Ketapiang	
18		Amin	Ketapiang	
19	Mutiara Laut	Junaidi	Paingan	
20		Faizal	Paingan	

Gambar 3 1
TEMU TEKNIK PENINGKATAN





B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Kelompok Nelayan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Yang Menerima Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

No	Nama Kelompok Nelayan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Paket	Ket
1	2	3	4	5	6
1	KUB Mutiara Laut	Fijal	Korong Sigurung Nagari Gguguak Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau	1 Unit	Mesin Tempel 15 PK
2		Irfianto	Korong Sigurung Nagari Gguguak Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau	10 peecis	Jaring Gillnet PE (Benang)
3		Yuanes	Korong Sigurung Nagari Gguguak Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau	10 peecis	Jaring Gillnet PE (Benang)
4		Junaidi	Korong Sigurung Nagari Gguguak Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau	10 peecis	Jaring Gillnet PE (Benang)
5		Am Sari Bambang Saputra	Korong Sigurung Nagari Gguguak Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau	10 peecis	Jaring Gillnet PE (Benang)
6	KUB Maju Bersama	Nofrizal	Korong Karamat Jaya Nagari Manggopoh Palak Gadang Kec. Ulakan Tapakis	1 Unit	Mesin Long Tail 9 PK

No	Nama Kelompok Nelayan	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Paket	Ket
1	2	3	4	5	6
7		Andriz	Korong Karamat Jaya Nagari Manggopoh Palak Gadang Kec. Ulakan Tapakis	1 Unit	Mesin Long Tail 9 PK
8		M. Rizal	Korong Karamat Jaya Nagari Manggopoh Palak Gadang Kec. Ulakan Tapakis	1 Unit	Mesin Long Tail 9 PK
	KUB Baronang	Joni	Korong Simapang Nagari Ketapiang Kecamatan Batang Anai	1 Unit	Mesin Tempel 40 PK
		Amar Satria Zikri	Korong Simapang Nagari Ketapiang Kecamatan Batang Anai	1 Unit	Mesin Tempel 15 PK

Gambar 3 2
DOKUMEN PENERIMA BANTUAN SOSIAL



a) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan ikan dalam rangka pengadaan dan pengendalian mutu ikan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan peningkatan produksi baik kualitas maupun kuantitasnya dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya :

- 1) Pelaksanaan pelayanan teknis terhadap UPTD TPI
- 2) Memberikan pelayanan informasi bidang perikanan kepada masyarakat
- 3) Memberikan rekomendasi BBM pada Masyarakat Nelayan/Kelompok

Tabel
Realisasi Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (100 %)
Memberikan Surat Rekomendasi BBM	295 surat	295 surat	100
surat rekomendasi BBM yang telah dikeluarkan	33 surat yaitu yang menggunakan Mesin Tempel 40 PK	33 surat	100
	262 surat yaitu yang menggunakan Mesin Tempel 15 PK	262 surat	100

1). Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Operasional UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 12 bulan selama tahun 2025 yang terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis. Kegiatan pelelangan ikan yang dilaksanakan pada UPTD TPI dapat dilihat pada

Gambar 3 3
DOKUMEN KEGIATAN TPI



3. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Capaian indikator kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah pada Lubuk Larangan Perairan Umum sebanyak 147 titik berada di

17 Kelompok di Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman Selengkapnya, pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3 11
Realisasi Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1.	Lubuk Larangan yang diawasi	147 Titik	143 titik	97
2	Monitoring dan Pembinaan Pokmaswas	64 Pokmaswas	64 Pokmaswas	100
3	Kegiatan restocking Anggran APBD Perubahan TA. 2025 Rp. 39.980.000,-.	17 Lubuk Larangan	17 Lubuk Larangan	100

1). Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota

Pengelolaan perairan umum sangat berpotensi untuk meningkatkan produksi perikanan. Salah satunya melalui kegiatan memasukan kembali jenis ikan endemik dengan tujuan untuk menebar ulang jenis endemik diperairan umum, menyeimbangkan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati menambah dan menjaga keanekaragaman sumberdaya hayati di suatu perairan. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan terhadap 17 Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) lubuk larangan serta penyediaan jenis ikan endemik di perairan umum pada 17 lokasi lubuk larangan.

Tabel 3 12

Nama Kelompok yang dapat bantuan benih ikan untuk lubuk larangan perairan umum

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Barang
1.	Nagari Kapalo Hilalang	Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
2.	Pokmaswas Dusun Baru Sepakat	Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 10.000 ekor Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
3.	Pokmaswas Persatuan Pemuda Korong Jambak	Korong Jambak Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
4.	Nagari Toboh Gadang Barat	Nagari Toboh Gadang Barat Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
5.	Pokmaswas Banda Panjang	Nagari Toboh Gadang Timur Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
6.	Pokmaswas Kampung Baru	Nagari Pungguang Kasiak Kecamatan Lubuk Alung	Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
7.	Pokmaswas Kampuang V Koto Sakato	Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
8.	Pokmaswas LP3G Korong Padang Gelapung	Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
9.	Pokmaswas Cahaya Kehidupan	Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuak Alung	Benih Ikan Nila (Uk, 5-7cm) Jumlah: 5.000 ekor
10.	Pokmaswas Singguliang	Nagari Singguliang Kecamatan Lubuk Alung	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 4.140 ekor
11.	Nagari Sungai Buluah Utara	Nagari Sungai Buluah Utara Kecamatan Batang Anai	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor

12	Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak	Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sungai Sariak Kecamatan VII Koto	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 3.000 ekor Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 2.000 ekor
13	Nagari Sungai Sariak	Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto	Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
14	Nagari Campago	Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampuang Dalam	Benih Ikan Nila (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor
15	Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu	Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging	Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 7.500 ekor
16	Nagari Limau Puruik	Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur	Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.502 ekor
17	Pokmaswas PERSADA (Persatuan Pemuda Sadang)	Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Benih Ikan Mas (Uk. 5-7 cm) Jumlah : 5.000 ekor

Gambar 3 4
DOKUMENTASI (RESTOCKING)



IKU-2**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap****A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk IKU-2 “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya” adalah 58.963,38 ton/tahun dan produksi perikanan budidaya tahun 2024 sebanyak 57.914,62 ton/tahun atau Peningkatan sebesar 1,81 % dengan menggunakan formulasi perikanan (*Produksi perikanan Budidaya tahun n dikurangi produksi perikanan Budidaya tahun n-1*) dibagi produksi perikanan Budidaya tahun n-1 kali 100% . Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dan dikategorikan “berhasil”. Selengkapnya, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-2) dapat dilihat pada Tabel 3.12

Tabel 3 13
Capaian Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2)
Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Persen (%)	2,12 %	1,81%	85,73 %	Cukup Berhasil

Tabel 3 14
Capaian Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2)
Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen (%)	2,08 %	1,81%	87,02 %	Cukup Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU-2) Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 1,81%. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra 2021–2026 sebesar 2,12%, maka tingkat capaian kinerja mencapai 85% dengan kategori cukup berhasil. Sementara itu, berdasarkan target dalam Renstra 2025–2030 sebesar 2,08%, capaian kinerja tercatat sebesar 87,02% dengan kategori berhasil sesuai data yang disajikan.

Perbedaan persentase capaian tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian target pada dokumen Renstra terbaru. Dengan target yang lebih mendekati kondisi

aktual dan potensi pengembangan budidaya perikanan, tingkat pencapaian kinerja menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor perikanan budidaya pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan dalam Renstra terbaru.

Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas melalui penguatan teknologi budidaya, peningkatan kualitas benih dan pakan, pengendalian penyakit ikan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya agar target produksi dapat tercapai secara optimal pada tahun-tahun berikutnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kinerja capaian sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan dengan indikator kinerja persentase tingkat produksi perikanan budidaya dapat dilihat sebagai berikut;

*Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-2)
Persentase Tingkat Produksi Perikanan budidaya Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Persen (%)	2,09 %	2,11%	100,95 %	2,12 %	1,81%	85,37 %	Cukup Berhasil

*Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-2)
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan budidaya Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Produksi Perikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen (%)	2,09 %	2,11%	100,95 %	2,08 %	1,81%	87,02 %	Cukup Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU-2) yaitu **Persentase Tingkat/Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya** pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada pada kategori **Cukup Berhasil**.

Berdasarkan **Renstra 2021–2026**, target peningkatan produksi perikanan budidaya Tahun 2025 ditetapkan sebesar **2,12%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **1,81%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **85,37%** dari target, sehingga dikategorikan **Cukup Berhasil**.

Sementara itu, berdasarkan **Renstra 2025–2029**, target Tahun 2025 disesuaikan menjadi **2,08%**, dengan realisasi yang sama yaitu **1,81%**. Penyesuaian target tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **87,02%**, yang juga termasuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi peningkatan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan dari **2,11%** menjadi **1,81%**, atau turun sebesar **0,30 poin persentase**. Pada Tahun 2024, realisasi bahkan telah melampaui target dengan capaian **100,95%**, sedangkan pada Tahun 2025 capaian menurun karena realisasi tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Perbedaan persentase capaian antara kedua Renstra disebabkan oleh adanya penyesuaian target kinerja. Target pada **Renstra 2025–2029** yang lebih rendah (**2,08%**) dibandingkan target pada **Renstra 2021–2026** (**2,12%**) menyebabkan persentase capaian menjadi lebih tinggi (**87,02%**) meskipun nilai realisasinya tetap sama.

Secara keseluruhan, capaian IKU-2 Tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan budidaya masih perlu dioptimalkan. Penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi produktivitas budidaya, seperti kondisi lingkungan dan kualitas air, ketersediaan benih dan pakan, serangan hama dan penyakit ikan, serta kemampuan penerapan teknologi budidaya oleh pembudidaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pengembangan budidaya melalui peningkatan kualitas benih, penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien, penyediaan sarana produksi, pengendalian penyakit ikan, serta peningkatan kapasitas pembudidaya agar target kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

C. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Selama periode 5 (Lima) tahun mulai dari tahun 2021 – 2025, realisasi kinerja IKU-2 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya belum melampaui target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan sebesar 1,81% dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.12, Tabel 3.13 dan Gambar 3.4

Tabel 3 15
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah Berdasarkan renstra 2021-2026

SASARAN STRATEGIS-1						MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN						Capaian			
IKU-2						PRESENTASE TINGKAT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA(%)						Target Realisasi			
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah									
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2,01 %	2,03 %	2,05 %	2,09%	2,12%	2,10%	2 %	4,6%	2,08%	2,11%	1,81%		101%	100,95%	85,37 %	

Tabel 3 5
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah Berdasarkan renstra 2025-2029

SASARAN STRATEGIS-1						MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN						Capaian			
IKU-2						PRESENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA(%)						Target Realisasi			
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah									
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2,01 %	2,03 %	2,05 %	2,09%	2,08%	2,10%	2 %	4,6%	2,08%	2,11%	1,81%		101%	100,95%	87,02%	

Sumber: LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2016, 2017, dan 2018, 2019, 2020 dan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU-2) **Persentase Tingkat/Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya** menunjukkan bahwa capaian kinerja selama periode Renstra mengalami perkembangan yang cukup baik pada beberapa tahun awal, namun mengalami penurunan pada Tahun 2025.

Berdasarkan **Renstra 2021–2026**, target peningkatan produksi perikanan budidaya ditetapkan meningkat secara bertahap dari **2,01% pada Tahun 2021** menjadi **2,10% pada Tahun 2026**. Realisasi pada Tahun 2021 mencapai **2,00%**, kemudian meningkat signifikan menjadi **4,60% pada Tahun 2022**, dan kembali berada pada kisaran target pada Tahun 2023 dengan realisasi **2,08%**. Pada Tahun 2024, realisasi meningkat menjadi **2,11%**, melampaui target **2,09%** dengan capaian **100,95%**. Namun pada Tahun 2025, realisasi menurun menjadi **1,81%**, sedangkan target meningkat menjadi **2,12%**, sehingga tingkat capaian hanya mencapai **85,37%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya belum mampu mempertahankan capaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, berdasarkan **Renstra 2025–2029**, target Tahun 2025 mengalami penyesuaian menjadi **2,08%**, sedangkan target Tahun 2026 tetap sebesar **2,10%**. Dengan realisasi Tahun 2025 sebesar **1,81%**, tingkat capaian menjadi **87,02%**. Persentase capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian berdasarkan Renstra 2021–2026 karena target yang ditetapkan lebih rendah, sementara nilai realisasi tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan, tren kinerja menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya mampu mencapai bahkan melampaui target pada Tahun 2023 dan 2024, tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan masih adanya berbagai tantangan dalam pengembangan usaha budidaya, antara lain perubahan kondisi lingkungan budidaya, kualitas air, ketersediaan benih dan pakan, serangan hama dan penyakit ikan, serta keterbatasan penerapan teknologi budidaya oleh pembudidaya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui penyediaan benih unggul, peningkatan kualitas sarana dan prasarana budidaya, penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, pengendalian penyakit ikan, serta penguatan pembinaan dan pendampingan kepada pembudidaya. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi kinerja sehingga target jangka menengah hingga akhir periode Renstra dapat tercapai secara optimal.

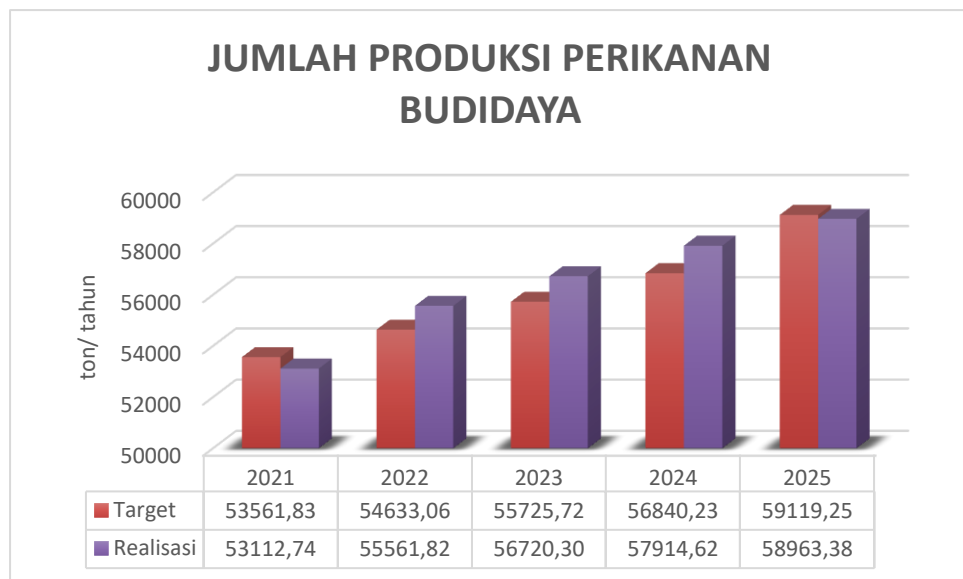
Komoditas yang berpengaruh terhadap perkembangan jumlah produksi perikanan budidaya yang paling dominan adalah udang vaname. Selain udang vaname, jumlah produksi Ikan Nila dan Ikan Gurami, Ikan Lele, Ikan Mas, Ikan Garing, Bawal Tawar, dan Ikan Patin juga mempengaruhi kenaikan dan penurunan jumlah produksi perikanan budidaya. Jenis komoditas perikanan budidaya tersebut diproduksi oleh Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain Pokdakan, pembudidayaan ikan juga dilakukan oleh pihak swasta/ investor terutama budidaya udang vaname. Selengkapnya, perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.14 sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja produksi perikanan budidaya tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada gambar 3.3.

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan Tahun 2021-2025

No	Jenis Ikan	Produksi Tahun(Ton)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Ikan Mas	4.456,10	2.308,10	2.859,50	1.030,56	1.958,20	
2	Ikan Nila	19.874,79	23.424,30	21.888,38	9.433,60	19.830,36	
3	Ikan Gurami	13.975,30	11.647,00	12.448	7.022,20	15.460,67	
4	Ikan Patin	926,52	2.530,80	1.938,42	1.048,26	1.486,84	
5	Ikan Lele	11.961,13	8.243,42	10.935,96	4.956,34	15.392,88	
6	Bawal Tawar	25,10	13,60	14,10	7,80	9,97	
7	Udang Vanamae	1.830,00	3.259,20	3.711,50	1.471,98	3.174,92	
8	Garing	63,80	68,80	102,24	41,24	91,74	-

JUMLAH	53.112,74	51.495,22	53.898,10	24.962,94	57.405,58	-
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Sumber: Buku Informasi Statistik Dinas Perikanan Tahun 2022 dan 2025



**Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2021 – 2025**

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 adalah sebesar 58.963,38 ton. Dimana produksi perikanan budidaya pada tahun ini meningkat 1,81 % dari tahun 2024 (57.914,62 ton). Produksi perikanan budidaya pada tahun ini meningkat sebanyak 1.048,76

D. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Upaya Peningkatan

Peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi pembudidaya ikan seperti Bimbingan Teknis bagi pembudidaya ikan, Pelatihan Teknis Budidaya, Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan cara pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan.
2. Adanya program / Anggaran pada Nagari-Nagari dalam upaya peningkatan ketahanan Pangan bagi masyarakat, dalam bentuk bantuan benih ikan, pakan ikan, sarana budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya
3. Adanya program terIntegrasi antara Kementerian dan lembaga dalam peningkatan produksi Perikanan budidaya melalui kegiatan sistem bioflok ikan nila dengan Pertanian (Palawija) komoditas jagung

Sedangkan faktor penghambat diantaranya :

1. Penguasaan teknologi budidaya pada pembudidaya ikan belum merata
2. Biaya produksi budidaya cukup tinggi terutama pakan ikan
3. Kemampuan permodalan masih belum memadai
4. Kuantitas dan kualitas indukan sudah menurun
5. Pengelolaan lingkungan budidaya belum optimal

E. Langkah Tindak Lanjut

1. Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan tentang teknis budidaya bekerjasama dengan stake holder terkait
2. Memfasilitasi Bantuan permodalan dari lembaga keuangan atau CSR
3. Memotifasi Pembudidaya ikan untuk memproduksi pakan mandiri
4. Peremajaan Induk yang berkualitas
5. Penerapan Biosecurity dalam pembudidayaan ikan

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai keberhasilan sasaran strategis-2, telah dilaksanakan 1 (satu) program yaitu program pengelolaan perikanan budidaya yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil (2 sub kegiatan) dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan (2 sub kegiatan). Anggaran yang dialokasikan dari

APBD Tahun 2025 untuk program di atas adalah sebesar Rp 50.946.460,00 dan terealisasi sebesar Rp. 50.676.000,00 atau 99,47 %. Alokasi anggaran dan realisasi seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.15 sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel 3.16

Tabel 3 16
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	50.946.460,00	50.676.000,00	270.460,00	99,47%
1.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	50.946.460,00	50.676.000,00	270.460,00	99,47%
1)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.946.460,00	50.676.000,00	270.460,00	99,47%
	Jumlah	50.946.460,00	50.676.000,00	270.460,00	99,47%

Tabel 3 17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Persentase Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	87,02%	99,47%	-12,45%

Efisiensi Capaian Kinerja = $87,02 - 100 = -12,98$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100 - 99,47 = 0,53$

Total Efisiensi = $-12,98\% + 0,53\% = -12,45\%$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, **Indikator Kinerja Utama (IKU-2) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya** memperoleh **capaian kinerja sebesar 87,02%**, dengan **penyerapan anggaran sebesar 99,47%**. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar -12,45%**.

Nilai efisiensi yang negatif menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Belum optimalnya capaian peningkatan produksi perikanan budidaya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi lingkungan budidaya, kualitas air yang kurang mendukung, keterbatasan ketersediaan benih dan pakan berkualitas, serangan hama dan penyakit ikan, serta belum optimalnya penerapan teknologi budidaya oleh pembudidaya. Faktor-faktor tersebut berdampak pada produktivitas usaha budidaya sehingga target peningkatan produksi belum dapat dicapai secara maksimal

G. Program/ Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja IKU-2

Dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka sangat diperlukan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan diantaranya adalah Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

a) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan temu teknis budidaya ikan Kabupaten Padang Pariaman merupakan rangkaian dari kegiatan Pembinaan dan pendampingan bagi pembudidaya Ikan/UPR di Kabupaten Padang Pariaman. Kita tahu bahwa kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan yang kesemuanya memiliki potensi dan peluang dalam pengembangan usaha Budidaya Ikan yang perlu dikembangkan untuk pencapaian target produksi, serta menjadikan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai penghasil usaha budidaya ikan Gurami, Nila, Lele dan patin. Untuk menumbuh kembangkan usaha perikanan di Kabupaten padang pariaman tersebut diperlukan Sumberdaya bagi pelaku usaha pembesaran/perbenihan yang handal serta mampu

melayani, mendorong dan menarik kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya, maka salah satu ditempuh dengan melakukan Temu teknis budidaya ikan di kabupaten padang pariaman.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari Temu Teknis budidaya ikan ini yaitu :

- a. Meningkatkan IPTEK, Wawasan dan keterampilan para pembudidaya ikan atau pelaku usaha.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan sekaligus memfasilitasi peningkatan pendapatan pembudidaya (POKDAKAN)
- c. Terbinanya dan terawasi kegiatan budidaya ikan di lapangan guna peningkatan usaha budidaya pada lokasi binaan ke depan.
- d. Untuk meningkatkan produksi ikan di kabupaten Padang pariaman

Gambar 3 5
DOKUMENTASI BIMTEK BUDIDAYA



b) Kegiatan Belanja Modal bangunan Perikanan**1. Gambaran Umum Kegiatan**

UPTD BBI Lubuk Alung merupakan salah satu UPTD milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibawah naungan Dinas Perikanan, memiliki luas 2 Ha berlokasi di Nagari Singguliang Kecamatan Lubuk Alung. Salah satu saluran air pasok (masuk) BBI telah mengalami kerusakan akibat dihantam/digerus banjir sehingga tidak memadai dan mengkhawatirkan terhadap kelangsungan hidup ikan sehingga perlu direhab. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan pembangunan/rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) UPTD BBI Lubuk Alung.

Pembangunan/rehabilitasi air pasok dan/atau buang di UPTD BBI Lubuk Alung dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air. Sistem air yang baik akan mendukung kegiatan budidaya ikan yang optimal, menjaga kualitas air, serta mencegah pencemaran lingkungan.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sesuai program yang ditentukan dan mewujudkan suasana dan situasi yang kondusif di BBI Lubuk Alung.

Tujuan kegiatan adalah Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) UPTD BBI Lubuk Alung

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah UPTD BBI Lubuk Alung

4. Tindak Lanjut

Pengembangan usaha budidaya ikan air tawar diarahkan pada kegiatan perluasan kawasan melalui peningkatan sarana prasarana budidaya UPTD BBI serta peningkatan SDM petugas BBI.

Gambar 3 6
Pembangunan/Rehabilitasi Saluran air pasok dan/atau buang UPTD BBI Lubuk Alung



SASARAN STRATEGIS 2 (SS-2)
“Meningkatnya Pengolahan Hasil Perikanan”

Sasaran Strategis-2 “Meningkatkan Pengolahan Hasil Perikanan”, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan

IKU-3

Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk IKU-3 “Jumlah Produksi Ikan Olahan” adalah 193,72 ton/tahun dan Jumlah produksi olahan tahun 2024 adalah 190,67 ton/tahun atau dengan persentase naik sebesar 1,60 % dengan menggunakan formulasi (*Produksi ikan olahan tahun n dikurangi produski ikan olahan tahun n-1*) dibagi produksi ikan olahan tahun n-1 kali 100% Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dengan interpretasi “Cukup berhasil”. Selengkapnya, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-1) dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3 18
Capaian Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3)
Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Pengolahan Hasil Perikan	Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan	Persen (%)	2,04 %	1,60 %	78,43 %	Cukup Berhasil

Tabel 3 19
Capaian Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3)
Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Pengolahan Hasil Perikan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen (%)	1,90 %	1,60 %	84,21 %	Cukup Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU-3) Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 1,60%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2021–2026 sebesar 2,04%, maka capaian kinerja mencapai 78,43% dengan kategori cukup berhasil. Sementara itu, apabila diukur berdasarkan target Renstra 2025–2029 sebesar 1,90%, capaian kinerja meningkat menjadi 84,21% dan tetap berada pada kategori cukup berhasil.

Perbedaan capaian tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian target pada dokumen Renstra terbaru. Dengan target yang lebih rendah dibandingkan Renstra sebelumnya, persentase capaian menjadi lebih tinggi meskipun realisasi yang diperoleh tetap sama, yaitu sebesar 1,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja subsektor pengolahan hasil perikanan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih memerlukan upaya peningkatan agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi capaian produksi ikan olahan antara lain ketersediaan bahan baku, kapasitas dan teknologi pengolahan, kualitas sumber daya manusia pelaku usaha, akses pemasaran produk, serta dukungan sarana dan prasarana pengolahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan, penguatan diversifikasi produk, peningkatan mutu dan keamanan pangan, serta perluasan akses pasar guna mendorong peningkatan produksi ikan olahan pada tahun-tahun mendatang.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kinerja capaian sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan dengan indikator kinerja persentase tingkat produksi perikanan ikan Olahan dapat dilihat sebagai berikut;

*Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-3)
Persentase Tingkat Produksi ikan olahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Pengolahan Hasil Perikan	Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan	Persen (%)	2,02 %	1,76%	87,12 %	2,04 %	1,60%	78,43 %	Cukup Berhasil

*Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-3)
Persentase Tingkat Peningkatan olahan Perikanan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Pengolahan Hasil Perikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Olahan	Persen (%)	2,02 %	1,76%	87,12 %	1,90 %	1,60%	84,21 %	Cukup Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU-3) yaitu **Persentase Tingkat/Peningkatan Produksi Perikanan Olahan** pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, tingkat capaian masih berada pada kategori **Cukup Berhasil**.

Berdasarkan **Renstra 2021–2026**, target peningkatan produksi ikan olahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar **2,04%**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **1,60%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **78,43%** dari target, sehingga dikategorikan **Cukup Berhasil**.

Sementara itu, berdasarkan **Renstra 2025–2029**, target Tahun 2025 mengalami penyesuaian menjadi **1,90%**, dengan realisasi yang tetap sebesar **1,60%**. Penyesuaian target tersebut menghasilkan tingkat capaian sebesar **84,21%**, yang juga termasuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi peningkatan produksi ikan olahan mengalami penurunan dari **1,76%** menjadi **1,60%**, atau turun sebesar **0,16 poin persentase**.

Pada Tahun 2024, capaian kinerja mencapai **87,12%**, sedangkan pada Tahun 2025 menurun menjadi **78,43%** berdasarkan Renstra 2021–2026. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi hasil olahan perikanan pada Tahun 2025 belum mampu mengikuti target yang telah ditetapkan.

Perbedaan persentase capaian antara kedua Renstra disebabkan oleh adanya penyesuaian target kinerja. Target pada **Renstra 2025–2029** yang lebih rendah (**1,90%**) dibandingkan target pada **Renstra 2021–2026** (**2,04%**) menyebabkan persentase capaian meningkat menjadi **84,21%**, meskipun nilai realisasi tetap sebesar **1,60%**.

Secara keseluruhan, capaian IKU-3 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengembangan sektor pengolahan hasil perikanan masih memerlukan perhatian lebih agar mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya ketersediaan bahan baku, fluktuasi permintaan pasar, kapasitas produksi pelaku usaha pengolahan, serta penerapan teknologi pengolahan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas unit pengolahan ikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, diversifikasi produk olahan, penguatan pemasaran, serta pembinaan terhadap pelaku usaha agar target kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat tercapai secara lebih optimal.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator persentase tingkat produksi perikanan ikan Olahan mengalami peningkatan dengan Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi pembudidaya ikan seperti Bimbingan Teknis bagi pembudidaya ikan, Pelatihan Teknis Budidaya, Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan cara pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Sosialisasi kesehatan ikan dan lingkungan

C. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target dan Realisasi Jangka Menengah

Selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2024-2025, cenderung mengalami kenaikan dari 190,67 ton/tahun (2024) menjadi 193,72 ton/tahun (2025). Realisasi dan capaian kinerja produksi hasil olahan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.21 dan Gambar 3.7.

Tabel 3 20
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah Berdasarkan renstra 2021-2026

SASARAN STRATEGIS-1						MENINGKATKAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN						Capaian				
IKU-2						PRESENTASE TINGKAT PRODUKSI IKAN OLAHAN (%)						Target Realisasi				
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah				
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
2,01 %	2,03 %	2,00 %	2,02%	2,04%	2,06%	2 %	3,5%	1,7%	1,76%	1,60%		99,5%	172%	85%	87,12%	78,43%

Tabel 3 21
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah Berdasarkan renstra 2025-2029

SASARAN STRATEGIS-1						MENINGKATKAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN						Capaian				
IKU-2						PRESENTASE Peningkatan PRODUKSI IKAN OLAHAN (%)						Target Realisasi				
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah				
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
2,01 %	2,03 %	2,00 %	2,02%	1,90%	1,92%	2 %	3,5%	1,7%	1,76%	1,60%		99,5%	172%	85%	87,12%	84,21%

Sumber: LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Renstra

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU-3) **Persentase Tingkat/Peningkatan Produksi Ikan Olahan** menunjukkan bahwa capaian kinerja selama periode Renstra mengalami fluktuasi. Pada awal periode perencanaan, realisasi mampu memenuhi bahkan melampaui target, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga capaian terhadap target menjadi lebih rendah.

Berdasarkan **Renstra 2021–2026**, target peningkatan produksi ikan olahan meningkat secara bertahap dari **2,01% pada Tahun 2021** menjadi **2,06% pada Tahun 2026**. Realisasi Tahun 2021 mencapai **2,00%** dengan tingkat capaian **99,50%**, kemudian meningkat signifikan pada Tahun 2022 menjadi **3,50%**, sehingga capaian mencapai **172%** dan jauh melampaui target. Pada Tahun 2023, realisasi menurun menjadi **1,70%** dengan capaian **85%**, kemudian sedikit meningkat pada Tahun 2024 menjadi **1,76%** dengan capaian **87,12%**. Namun pada Tahun 2025, realisasi kembali menurun menjadi **1,60%**, sementara target meningkat menjadi **2,04%**, sehingga tingkat capaian hanya mencapai **78,43%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi ikan olahan belum mampu mengikuti target yang telah ditetapkan pada akhir periode Renstra.

Sementara itu, berdasarkan **Renstra 2025–2029**, target Tahun 2025 disesuaikan menjadi **1,90%** dan target Tahun 2026 menjadi **1,92%**. Dengan realisasi Tahun 2025 sebesar **1,60%**, tingkat capaian meningkat menjadi **84,21%**. Persentase capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Renstra 2021–2026 karena adanya penyesuaian target yang lebih rendah, sedangkan nilai realisasi tetap sama.

Secara keseluruhan, tren kinerja menunjukkan bahwa produksi ikan olahan mencapai kinerja terbaik pada Tahun 2022 dengan capaian yang jauh melampaui target. Namun sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2025, realisasi mengalami penurunan sehingga capaian terhadap target juga menurun. Hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pengembangan sektor pengolahan hasil perikanan, antara lain keterbatasan pasokan bahan baku, fluktuasi permintaan pasar, kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang belum optimal, serta penerapan teknologi pengolahan yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan capaian pada akhir periode Renstra, diperlukan upaya yang lebih terarah melalui penguatan kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan, peningkatan kualitas dan kontinuitas bahan baku, modernisasi sarana dan prasarana pengolahan, diversifikasi produk olahan, perluasan akses pemasaran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengolahan hasil perikanan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan produksi ikan olahan dapat meningkat dan target kinerja jangka menengah dapat tercapai secara optimal

D. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Upaya Peningkatan

➤ **Faktor atau Hambatan produksi hasil olahan perikanan belum mencapai target**

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang nilai gizi ikan dan manfaat ikan
2. Masih rendahnya diversifikasi produk olahan perikanan
3. Ketersediaan bahan baku ikan Fluktuatif
4. Kualitas SDM Pengolah hasil perikanan belum merata
5. Sarana dan Prasarana Pengolahan hasil perikanan belum memadai
6. Kurang aktifnya kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

➤ **faktor pendukung nya adalah :**

1. Potensi produksi ikan sebagai bahan baku pengolahan hasil perikanan cukup tinggi
2. Minat masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk melakukan usaha hasil perikanan cukup tinggi

3. Usaha pengolahan hasil perikanan tidak membutuhkan modal yang tinggi
4. Peluang pemasaran cukup terbuka baik dalam pemasaran offline maupun online (Media sosial)

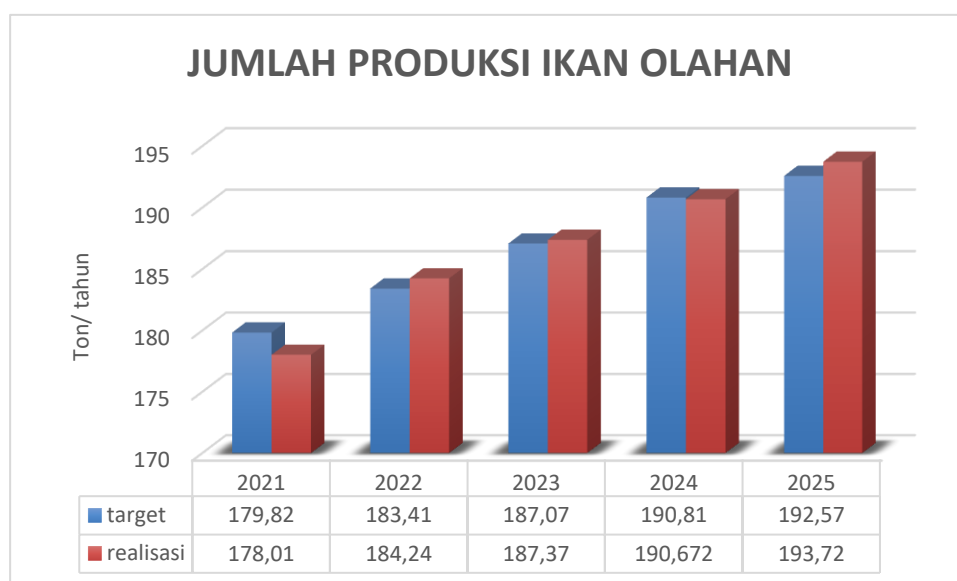
E. Langkah Tindak Lanjut

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang nilai gizi dan makan ikan melalui sosialisasi gemarikan serta bimbingan teknis diversifikasi pengolahan hasil perikanan
2. Peningkatan kapasitas SDM pengolah hasil perikanan melalui pelatihan
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan melalui APBD kab/prov dan APBN
4. Peningkatan pembinaan kelembagaan dan teknis kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan oleh petugas teknis dinas dan penyuluh perikanan

Dalam rangka peningkatan mutu hasil olahan ikan, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk meningkatkan kompetensi sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi. Di samping itu, pengawasan yang ketat oleh pemerintah sangat penting untuk mengatasi pemakaian bahan pengawet yang tidak direkomendasikan dalam pengolahan ikan.



Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan Tahun 2021 - 2025



Perkembangan Jumlah Produksi Ikan Olahan Tahun 2021 - 2025

Pada umumnya, usaha pengolahan ikan dilaksanakan oleh keluarga nelayan yang usaha utamanya menangkap ikan di laut. Pengolahan ikan dilaksanakan oleh isteri nelayan ketika hasil tangkapan ikan berlebih, yaitu dengan memanfaatkan ikan hasil tangkapan sebagai bahan baku dalam pengolahan hasil perikanan dengan cara pengeringan maupun metode pengolahan lainnya. Unit Pengolahan Ikan (UPI) merupakan istilah yang dipakai untuk tempat melakukan aktivitas pengolahan ikan. Pengolahan ikan dapat berupa penggaraman /pengeringan, pengasapan/ pemanggangan dan Pengolahan Lainnya. Jumlah UPI pada tahun 2025 adalah 234 Unit UPI. Kegiatan pengolahan ikan yang paling banyak dilakukan adalah penggaraman ikan/ pengeringan

ikan oleh kelompok pengolah maupun usaha milik pribadi. Pada tahun 2025, terdapat sebanyak 830 Rumah Tangga Nelayan (RTP) di Kabupaten Padang Pariaman. Produk olahan ikan yang dihasilkan berupa ikan kering, sala bulek, sala kepiting, sala udang, sala baledang dan rakik maco dan lain-lain

Tabel 3 22
Perkembangan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025

No	Jenis Ikan	Produksi Tahun (Ton) / Unit				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Unit Pengolahan Ikan (UPI)	193	207	217	224	234
2.	Penggaraman /Pengeringan	67	71	72	80	96,401
3.	Pengasapan/ Pemanggangan	2	2	2	2	2,980
4.	Pengolahan Lainnya	106	120	124	120	84,427
5.	Pelumatan Daging	16	12	17	20	8,841
6.	Fermentasi	2	2	2	2	1,070

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Persentase Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	84,21%	96,38%	-12,17%

Efisiensi Capaian Kinerja = $84,21 - 100 = -15,79$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100 - 96,38 = 3,62$

Total Efisiensi = $-15,79\% + 3,62\% = -12,17\%$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, **Indikator Kinerja Utama (IKU-3) Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan** memperoleh **capaian kinerja sebesar 84,21%**, dengan **tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,38%**. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, diperoleh **tingkat efisiensi sebesar -12,17%**.

Nilai efisiensi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa realisasi penggunaan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan program dan kegiatan pengolahan hasil perikanan telah didukung oleh alokasi anggaran yang cukup besar, hasil yang diperoleh belum sepenuhnya optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Belum optimalnya capaian kinerja pada sektor pengolahan hasil perikanan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pasokan bahan baku ikan, fluktuasi permintaan pasar, kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang belum maksimal, serta belum optimalnya penerapan teknologi pengolahan modern. Faktor-faktor tersebut berdampak pada rendahnya peningkatan produksi olahan meskipun anggaran telah direalisasikan dengan baik.

SASARAN STRATEGIS 3 (SS-3)

“Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan”

IKU-4

Angka Konsumsi Ikan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk IKU-3 “Angka Konsumsi Ikan” adalah 44,05 kg/ kapita/ tahun dengan target kinerja sebanyak 45,45kg/ kapita/ tahun atau dengan persentase capaian sebesar 96,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja sudah memenuhi target dengan interpretasi “ berhasil”. Selengkapnya, Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-4) dapat dilihat pada Tabel 3.23

Tabel 3 23
Capaian Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4)
Persentase Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	45,95	44,05	95,86%	Berhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4)
Angka Konsumsi Ikan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	45,95	44,05	95,86%	Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU-4) yaitu **Persentase Tingkat Konsumsi Ikan** berdasarkan Renstra 2021–2026 atau **Angka Konsumsi Ikan** berdasarkan Renstra 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 berada pada kategori **Berhasil**.

Berdasarkan **Renstra 2021–2026**, target konsumsi ikan Tahun 2025 ditetapkan sebesar **45,95 kg/kapita/tahun**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **44,05 kg/kapita/tahun**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **95,86%**, sehingga termasuk dalam kategori **Berhasil**.

Demikian pula berdasarkan **Renstra 2025–2029**, target dan realisasi indikator tidak mengalami perubahan, yaitu target sebesar **45,95 kg/kapita/tahun** dengan realisasi **44,05 kg/kapita/tahun**. Oleh karena itu, tingkat capaian tetap sebesar **95,86%** dan berada pada kategori **Berhasil**.

Perbedaan antara kedua Renstra hanya terletak pada penyebutan indikator, yaitu "**Persentase Tingkat Konsumsi Ikan**" pada Renstra 2021–2026 dan "**Angka Konsumsi Ikan**" pada Renstra 2025–2029. Namun demikian, target, realisasi, dan tingkat capaian yang diperoleh tetap sama sehingga tidak memengaruhi hasil pengukuran kinerja.

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan jumlah kebutuhan/ permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari instansi yang berwenang menghitung angka tersebut yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).Capaian pada tahun 2025 konsumsi ikan sebesar 44,05 kg/kapita/tahun turun sebesar 2,9 % dari 45,38

kg/kapita/tahun (2024) dengan predikat “berhasil”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegemaran masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam mengkonsumsi ikan masih rendah. Sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Salah satunya adalah dengan tetap meningkatkan program inovatif Dinas Perikanan yang telah dilaksanakan yaitu Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Disamping itu perlu lebih banyak melaksanakan kegiatan diverifikasi produk olahan perikanan yaitu berupa demonstrasi pengolahan ikan menjadi produk olahan seperti naget, kaki naga, dimsum, bakso ikan, rakik ikan dan lain-lain dengan sasaran Ibu-ibu PKK, kelompok Dasawisma dan orang tua murid TK.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kinerja capaian sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan dengan indikator kinerja persentase tingkat produksi perikanan ikan Konsumsi dapat dilihat sebagai berikut;

*Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-4)
Persentase Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikan	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita /Tahun	45,45	45,38	99,84%	45,45	44,05	96,92%	Berhasil

*Capaian Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-4)
Angka Konsumsi Ikan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita /Tahun	45,45	45,38	99,84%	45,45	44,05	96,92%	Berhasil

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator persentase tingkat produksi perikanan ikan konsumsi mengalami peningkatan dengan salah satu faktor keberhasilan yaitu adanya keterlibatan Dinas Perikanan yang melakukan sosialisasi dan kampanye secara berkelanjutan berupa kegiatan sosialisasi gemar makan ikan (Gemarikan) baik kepada kelompok masyarakat maupun kepada siswa sekolah

C. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Jangka Menengah

Selama periode 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021 – 2025, realisasi capaian IKU tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,9 %. Capaian menurun di tahun 2025 dari 45,38 kg/kapita/tahun (2024) menjadi 44,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2025. Selengkapnya, realisasi kinerja

tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.24

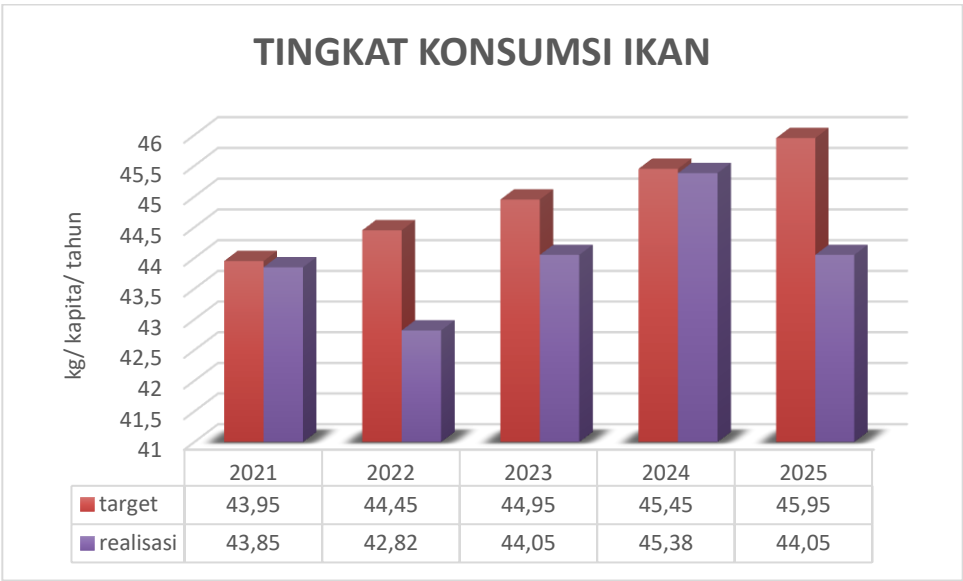
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS-3						MENINGKATKAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						Capaian				
IKU-4						TINGKAT KONSUMSI IKAN (%)						Target Realisasi				
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
43,95	44,45	44,95	45,45	45,95	46,45	43,85	42,82	44,05	45,38	44,05		99,77 %	96,33%	97,99 %	99,84%	96,92%

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS-3						MENINGKATKAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						Capaian				
IKU-4						AMGKA KONSUMSI IKAN (%)						Target Realisasi				
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
43,95	44,45	44,95	45,45	45,95	46,45	43,85	42,82	44,05	45,38	44,05		99,77 %	96,33%	97,99 %	99,84%	96,92%

sumber: LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2021-2026



D. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Upaya Peningkatan

Data konsumsi ikan yang diinputkan merupakan data konsumsi ikan sementara, hal ini dikarenakan perhitungan konsumsi ikan terbit di bulan Mei. Tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan sampai tahun 2024 dan penurunan di Tahun 2025. Disebabkan oleh kurang maksimalnya keterlibatan Dinas Perikanan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye secara berkelanjutan berupa kegiatan sosialisasi gemar makan ikan (Gemarikan) baik kepada kelompok masyarakat maupun kepada siswa sekolah. Namun, pada kenyataan di lapangan, masih terdapat

beberapa permasalahan lainnya yang dihadapi terkait dengan konsumsi ikan antara lain:

- 1) wawasan masyarakat terhadap nilai gizi dan manfaat ikan masih rendah,
- 2) ketertarikan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan masih rendah karena terbatasnya diversifikasi produk olahan ikan.

Gambar 3 7
KEGIATAN GEMARIKAN



SASARAN STRATEGIS 4 (SS-4)**Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah****IKU-5****Nilai AKIP Perangkat Daerah****A. Membandingkan Target dan Kinerja Tahun 2025**

Birokrasi yang bersih dan akuntabel ditandai dengan indeks perilaku anti korupsi yang semakin baik, nilai SAKIP meningkat dan dapat mempertahankan opini WTP dari BPK, sehingga secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja yang di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Sasaran “Birokrasi yang bersih dan akuntabel”guna untuk pencapaian realisasi dapat dihitung sebagai Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk pengukuran capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasil Evaluasi Inspektorat dari tahun lalu.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini untuk Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasil Evaluasi Inspektorat dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Capaian Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5) Nilai SAKIP Hasil Evaluasi
Inspektorat 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Angka	A (81)	A (80,15)	98,95	Berhasil

**Capaian Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5) Nilai AKIP Perangkat Daerah
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	A (81)	A (80,15)	98,95	Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU-5) yaitu **Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat** berdasarkan Renstra 2021–2026 atau **Nilai AKIP Perangkat Daerah** berdasarkan Renstra 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 berada pada kategori **Berhasil**.

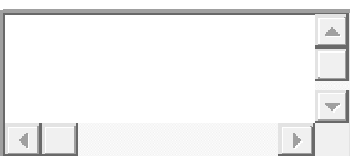
Berdasarkan **Renstra 2021–2026**, target Nilai SAKIP Tahun 2025 ditetapkan sebesar **81** dengan predikat **A**, sedangkan hasil evaluasi yang diperoleh mencapai **80,15** dengan predikat **A**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **98,95%**, sehingga termasuk dalam kategori **Berhasil**.

Sementara itu, berdasarkan **Renstra 2025–2029**, indikator mengalami perubahan nomenklatur menjadi **Nilai AKIP Perangkat Daerah** dengan sasaran strategis yang berorientasi pada **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. Meskipun demikian, target tetap sebesar **81** (predikat **A**) dan realisasi sebesar **80,15** (predikat **A**), sehingga tingkat capaian juga sebesar **98,95%** dengan kategori **Berhasil**.

Perbedaan antara kedua Renstra hanya terletak pada penyesuaian nomenklatur indikator dan sasaran strategis sebagai tindak lanjut terhadap penyelarasan dokumen perencanaan daerah. Perubahan tersebut tidak memengaruhi target maupun realisasi yang dicapai pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian IKU-5 menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)/Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di perangkat daerah telah terlaksana dengan baik. Nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja telah dilaksanakan secara efektif serta memenuhi sebagian besar kriteria yang ditetapkan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Meskipun target belum tercapai secara penuh, selisih antara target dan realisasi relatif kecil, yaitu **0,85 poin**, sehingga tetap mempertahankan predikat **A**. Ke depan, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perlu terus dilakukan melalui penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja, penguatan pengukuran indikator yang lebih terukur, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antarbidang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan upaya tersebut, diharapkan nilai AKIP/SAKIP pada tahun-tahun mendatang dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel.



Indikator Kinerja Utama (IKU-5) yang mengukur Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 80,15 dengan predikat A, dibandingkan target sebesar 81 dengan predikat A. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 98,95% dan termasuk dalam kategori berhasil.

Berdasarkan Renstra 2021–2026, indikator ini berada pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, sedangkan pada Renstra 2025–2029 indikator yang sama ditempatkan pada sasaran strategis Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Meskipun terjadi perubahan nomenklatur sasaran strategis dan indikator, target serta realisasi yang dicapai tetap sama sehingga menghasilkan persentase capaian yang identik, yaitu 98,95% dengan kategori berhasil.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam mendukung perbaikan kinerja organisasi. Meskipun target belum tercapai secara penuh, selisih yang sangat kecil antara target dan realisasi menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu mempertahankan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja pada kategori yang sangat baik.

Untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, peningkatan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome), optimalisasi monitoring dan evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target A dengan realisasi tahun A sehingga capaian kinerja 100% yang berarti Sasaran IKU Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dinilai berhasil. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 24,60
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 24
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 11,55
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 20,65

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini dengan tahun lalu untuk Nilai SAKIP Pemerintah Daerah hasil Evaluasi Inspektorat dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

*Capaian Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5)
Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	Angka	A (80)	A (80,65)	100	A (81)	A (80,15)	98,95	Berhasil

*Capaian Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5)
Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2026*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2025			Interpretasi
				Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	Target (Kenaikan)	Realisasi (%)	% Capaian	
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	A (80)	A (80,65)	100	A (81)	A (80,15)	98,95	Berhasil

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Perikanan mengalami penurunan.

C. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Jangka Menengah

Realisasi Indikator Kinerja “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat” pada tahun 2021 dengan nilai B dengan target RPJMD nilai B. Pada tahun 2022 realisasi BB dengan target RPJMD nilai (70) BB Pada tahun 2023 realisasi kinerja juga dengan nilai (77,85) BB Sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja juga dengan

nilai (80,65)A dari target RPJMD sebesar (80,) A Realisasi kinerja indikator “ Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat”, dan Pada Tahun 2025 mengalami penurunan dengan nilai (80,15) A dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah Berdasarkan renstra 2021-2026

SASARAN STRATEGIS-1						MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA						Capaian				
IKU-5						NILAI SAKIP HASIL EVALUASI INSPEKTORAT						Target Realisasi				
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
B	BB	BB	A (80)	A (81)	A (82)	B	BB	BB (77,85)	A (80,65)	A (80,15)		100	100	100	100	100

Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah Berdasarkan renstra 2025-2029

SASARAN STRATEGIS-1						MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH						Capaian				
IKU-5						NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH						Target Realisasi				
Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah										
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
B	BB	BB	A (80)	A (81)	A (82)	B	BB	BB (77,85)	A (80,65)	A (80,15)		100	100	100	100	100

d. Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja, Efisiensi Sumber Daya serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan.

NO	Sasaran	Indikator sasaran	Akar Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Efisiensi Sumber daya	Rencana Tindak Lanjut
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Beberapa dokumen SAKIP yang belum Lengkap	Sumber daya manusia yang masih berkualitas	Keterbatasan SDM dan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana	Anggaran yang digunakan terserap dengan baik dengan hasil yang maksimal	1. Menambah SDM serta meningkatkan kualitasnya 2. Menambah anggaran

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Persentase Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	98,95%	93,12%	5,83%

Efisiensi Capaian Kinerja = $98,95 - 100 = -1,05$

Efisiensi Penyerapan Anggaran = $100 - 93,12 = 6,88$

Total Efisiensi = $-1,05\% + 6,88\% = 5,83\%$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, **Indikator Kinerja Utama (IKU-5) Nilai AKIP Perangkat Daerah** memperoleh **capaian kinerja sebesar 98,95%**, dengan **tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,12%**. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut menghasilkan **tingkat efisiensi sebesar 5,83%**.

Nilai efisiensi yang positif menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran telah berjalan **lebih efisien**, karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi anggaran yang terserap. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan akuntabilitas kinerja telah mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal dengan dukungan anggaran yang relatif lebih hemat.

Capaian nilai AKIP sebesar **98,95%** dengan predikat **A** menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah berjalan sangat baik. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

3.1 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Padang Pariaman, tetapi juga termasuk sumber pendanaan lainnya seperti dana Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2025, sumber pendanaan Dinas Perikanan terdiri dari APBD Kabupaten Padang Pariaman yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Peruntukan Bidang Pendidikan (DAU TAGING) Selengkapnya, realisasi keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.14

a. Realisasi Anggaran Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja 1 IKU-1

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.115.769.150,00	1.089.422.165,00	26.346.985,00	97,64 %
1.	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.110.081.650,00	1.083.752.165,00	26.329.485,00	97,63%
a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	810.081.650,00	793.075.165,00	17.006.485,00	97,90%
b.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	300.000.000,00	290.677.000,00	9.323.000,00	96,89%
2.	<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	5.687.500,00	5.670.000,00	17.500,00	99,69%
a.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5.687.500,00	5.670.000,00	17.500,00	99,69%

Realisasi Anggaran Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja 1 IKU-2

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	50.946.460,00	50.676.000,00	270.460,00	99,47%
1.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	50.946.460,00	50.676.000,00	270.460,00	99,47%
1)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.946.460,00	50.676.000,00	270.460,00	99,47%
	Jumlah	50.946.460,00	50.676.000,00	270.460,00	99,47%

Realisasi Anggaran Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja 2 dan 3 IKU-3 dan 4

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
V	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	12.440.938,00	11.990.000,00	450.938,00	96,38 %
1.	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	12.440.938,00	11.990.000,00	450.938,00	96,38 %
1)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.440.938,00	11.990.000,00	450.938,00	96,38 %

d. **Realisasi Anggaran Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja 4 IKU-5**

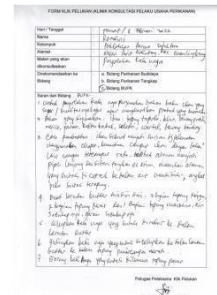
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.516.514.354,00	3.274.690.267,00	241.824.087,00	93,12
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	13.690.000,00	13.330.000,00	360.000,00	97,37
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.600.000,00	6.260.000,00	340.000,00	94,85
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.090.000,00	7.070.000,00	20.000,00	99,72
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.947.189.505,00	2.850.081.286,00	97.108.219,00	96,72
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.969.505,00	2.746.661.286,00	95.308.219,00	96,66
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.220.000,00	103.420.000,00	1.800.000,00	98,29
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.821.419,00	83.597.520,00	3.223.899,00	96,29
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	100,00
2)	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.000.000,00	3.592.500,00	407.500,00	89,81
3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.818.419,00	78.002.020,00	2.816.399,00	96,52
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.813.430,00	327.681.461,00	141.131.969,00	69,90
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.662.550,00	10.575.200,00	87.350,00	99,18
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.450.000,00	55.926.261,00	1.523.739,00	97,35
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.210.000,00	6.180.000,00	30.000,00	99,52
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.490.880,00	255.000.000,00	139.490.880,00	64,64
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0

Program Kegiatan

INOVASI DINAS PERIKANAN

Klik Pelukan (Klinik Konsultasi Pelaku Usaha Perikanan)

- Penyediaan Layanan Konsultasi bagi pelaku usaha Perikanan, Kecamatan, Nagari, Organisasi Kemasyarakatan tentang teknis perikanan



One Home One Pool

- Satu Rumah Satu Kolam



- Bukan Kampung (Berkolaborasi untuk memajukan kampung perikanan)

Inovasi dan kolaborasi dengan tiap OPD terhadap Program kampung budidaya Perikanan di Nagari Sungai Asam

- Budikdamber (Budidaya Ikan Dalam Ember)



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Beberapa hal yang bisa disimpulkan antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kinerja dimasing-masing bidang yang ada.
2. Capaian kinerja Dinas Perikanan terhadap target Renstra Dinas Perikanan yang telah ditetapkan ada yang mencapai target. Capaian kinerja meningkatkan produksi Dinas Perikanan menggunakan Lima indikator kinerja. 3 Indikator kinerja mencapai kategori Berhasil, dan 2 indikator kinerja mencapai kategori Cukup Berhasil.
3. Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perikanan tahun 2025 sebesar 93,12%.

4.2 Langkah Kedepan

Dinas Perikanan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan komitmen yang sudah ditetapkan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja utama. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan strategi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang:

1. Memberikan bantuan peralatan perikanan tangkap dengan teknologi yang lebih maju sehingga dapat meningkatkan hasil produksi ikan;
2. Melakukan lebih banyak pembinaan kolaborasi dengan perangkat daerah lainya serta lebih banyak koordinasi antar Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan;

3. Melakukan monitoring secara rutin terhadap pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana perikanan, produksi perikanan maupun serangan hama dan penyakit ikan;
4. Melakukan pendampingan terhadap pembudidaya ikan dalam hal penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dalam usaha budidaya Perikanan, Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dalam usaha pembenihan ikan serta Cara Pengolahan Ikan Yang Baik (CPPOB) pada usaha pengolahan hasil perikanan;
5. Meningkatkan sistem pendataan statistik perikanan;
6. Melakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha perikanan baik nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah maupun pemasar hasil perikanan;

Lubuk Alung, 31 Januari 2026 Kepala Dinas

Perikanan Kabupaten Padang Pariaman



RAIRUL NIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 010